



Rencana Tata Guna Lahan Partisipatif Desa Kayupuring (Participatory Land Use Planning)

Program Peningkatan Kapasitas Sosial Ekonomi Masyarakat
Dalam Beradaptasi Perubahan Iklim
Di Desa Kayupuring Kabupaten Pekalongan
November 2021

Kerja sama:
Earthworm Foundation Indonesia-Mercy Corps Indonesia,
Pemerintah Desa Kayupuring dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan



Earthworm
Mercy Corps Indonesia



KATA PENGANTAR

Dokumen perencanaan tata guna lahan ini disusun dari hasil fasilitasi perencanaan tata guna lahan secara partisipatif (*Participatory Land Use Planning/PLUP*), sebagai upaya meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat dan desa terhadap perubahan iklim yang semakin tidak menentu guna memperbaiki kualitas hidupnya (*livelihood*), dalam hal ini Desa Kayupuring Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan hasil penilaian secara cepat (RRA) Desa Kayupuring Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim telah meningkatkan kerentanan masyarakat, kerentanan yang terjadi juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kesadaran dan kapasitas masyarakat, kapasitas kelembagaan lokal hingga implementasi kebijakan pembangunan daerah yang dinilai masyarakat belum maksimal.

Untuk membangun kapasitas resiliensi masyarakat terdampak perubahan iklim, dibutuhkan sebuah terobosan kebijakan perencanaan pengelolaan tata guna lahan partisipatif, komprehensif, yang terintegrasi yang memperhatikan keserasian fungsi lindung dan budidaya. Perencanaan pengelolaan tata guna lahan secara partisipatif (PLUP), merupakan upaya masyarakat dalam membuat kebijakan perencanaan pengelolaan tata guna lahan desa.

PLUP ini adalah pendekatan sekaligus metode yang dapat membantu masyarakat dalam menyajikan gagasan perencanaan, memetakan kapasitas wilayahnya, menganalisis situasi wilayahnya, hingga merumuskan strategi dan program meningkatkan kapasitas resiliensi dan livelihoodnya secara sistematis, terukur dan berkesinambungan.

PLUP ini menjadi inisiatif bersama antara Mercy Corp Indonesia (MCI) dan Earthworm Foundation Indonesia (EFI) bersama Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan beberapa desa terpilih lainnya.

Penyusun sangat terbuka pada semua pihak atas masukan dari laporan ini, semoga dokumen ini menjadi pertimbangan para pihak dalam mendukung percepatan pemulihan masyarakat di Desa Kayupuring dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Pekalongan, November 2021

Tim Penyusun

SAMBUTAN KETUA PKK DESA KAYUPURING



Assalammu 'alaikum wr.wb.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada EFI dan MCI yang telah mengadakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan petani dan peternak yang ada di wilayah Desa Kayupuring

Saya berpesan kepada para warga/petani dan peternak agar bekerja sama dalam kegiatan ini karena sukses dan tidaknya program yang akan dilaksanakan tidak lepas dari peran serta masyarakat yang serius sebagai pelaku utamanya, agar kedepan petani dan peternak tidak hanya sebagai nama profesi, namun untuk hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan betul-betul menjadi sebuah pekerjaan yang membanggakan dan juga menghasilkan. Tidak seperti yang dialami selama ini petani dan peternak belum bisa di andalkan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, apalagi nantinya akan adanya pendampingan yang dilakukan oleh EFI.

Sebenarnya potensi di Desa Kayupuring sangat bagus, ada sungai yang di jadikan wisata, ada sumberdaya hasil bumi yang sangat menonjol seperti gula semut dan kolang kaling, hanya saja sampai saat ini sumberdaya tersebut belum bisa mencapai titik tingkat produksi dan pemasaran yang bagus, sehingga memang perlu adanya pendampingan dari proses awal, baik dari perawatan tanaman, proses pengolahan dan sampai proses penjualan.

Selama ini yang terjadi di Kayupuring akhir-akhir ini adalah bahwa kapulogo mulai sulit berbuah, tanaman kopi juga hasil menurun tidak seperti tahun tahun sebelumnya dan hal yang baru juga terjadi pada hasil kolang-kaling kadang tidak laku.

Semoga dengan adanya kegiatan ini akan terjadi perubahan yang signifikan mengenai hasil yang diperoleh, baik dari segi kualitas maupun kuantitas hasil pertanian dan peternakanya. Saya berharap dengan adanya kegiatan ini, petani dan peternak bisa merasakan perubahan pendapatan/hasil pertanian yang diperoleh untuk peningkatan sosial ekonomi di Desa Kayupuring ini.

Kayupuring, September 2021

Soenarnah

(Ketua PKK Desa Kayupuring)

SAMBUTAN WAKIL MANAJEMEN EFI-MCI



Assalamualaikum Wr.Wb.

Terimakasih disampaikan atas waktu yang diberikan oleh pembawa acara. Tadi disampaikan saya sambutan dari EFI-MCI. Saya minta maaf Bapak Ibu kalau mewakili keduanya, kayaknya berat ini ya.

Alhamdulillah puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadiran Allah SWT, atas nikmat kesehatan, kemudian juga nikmat kekuatan dan semangat dari kita semua meluangkan waktu pada acara malam hari ini. Dan ini jadi sesuatu yang luar biasa dan menjadi syukur buat kita semua. Sholaawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, tiada yang kita harapkan dikemudian hari kecuali Syafaat dari Beliau, Amin Amin Amin Ya Robbal Alamin.

Baiklah bapak/ibu, sekali lagi terimakasih atas semangat dan kehadiran kita pada acara malam hari ini, kalau kita lihat ini bahasanya agak bingung-bingung juga kita ya, *"Participatory Land Use Planning"*, mungkin baru kita dengar juga nih.

Seperti yang telah disampaikan oleh ibu Ketua PPK Desa Kayupuring tadi bahwa dalam perjalanannya belakangan ini petani mengalami beberapa masalah dalam pertaniannya, mulai dari buah kopi yang menurun produksinya, hal tersebut juga terjadi pada buah kapulaga, sedangkan masalah lain terjadi pada kolang-kaling yang kadang tidak laku, dan dari beberapa masalah yang timbul tersebut mari bersama-sama kita mencari akar penyebab dari timbulnya berbagai masalah-masalah tersebut, tanpa kita ketahui masalah-masalah yang menjadi penyebabnya, sangat mustahil bagi kita untuk menemukan solusinya, nah dalam penggalian masalah tersebut di butuhkan kerjasama yang baik antara petani dan peternak juga, karena tidak mungkin kegiatan akan berjalan sepihak saja tanpa dukungan dari para petani langsung.

Dalam kegiatan kali ini EFI dan MCI akan mengajak masyarakat untuk dapat beradaptasi pada keadaan dimana musim yang saat ini sudah tidak lagi bisa diprediksi sehingga sangat berpengaruh pada hasil pertanian masyarakat, karena tidak mungkin jika masyarakat harus menghindari kondisi cuaca yang saat ini sudah tidak bisa di prediksi, satu-satunya yang dapat dilakukan yaitu beradaptasi dengan musim, dengan cara apa, dengan cara seperti diskusi yang malam ini di laksanakan.

Perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa kegiatan ini bukan acaranya MCI dan EFI saja, melainkan adalah acara kita semua yang ada disini. Jadi, kebetulan pada tahun ini kita kerja dengan 10 desa mulai dari Desa Kayupuring dan ada 9 desa yang lain, 6 desa diatas dan tengah serta 4 desa/kelurahan dibawah.

Kita juga mohon dari pada kita semua, energi kita untuk melakukan ini semua sampai ke proses *finish*-nya. Jadi ini ibaratnya kita baru melangkahakan kaki diposisi *start*. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat, sekali lagi terimakasih. Kalau ada kekurangan dalam acara ini kita mohon maaf, waktu dan tempat kami kembalikan kepada pembawa acara.

Billahitaufik wal hidayah, wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, November 2021

M. Khulwani
(Koordinator Area Hulu)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dampak yang terjadi akibat perubahan iklim ini, bukan hanya kerusakan sarana dan prasarana wilayah serta jaringan wilayah, namun juga berdampak serius terhadap mata pencaharian masyarakat sekitar tak terkecuali Desa Kayupuring Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan.

Guna meningkatkan kapasitas resiliensi dan adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim, berbagai upaya dilakukan. Dan Mercy Corp Indonesia (MCI) dan Earthworm Foundation Indonesia (EFI) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Desa berinisiatif mengembangkan program “Penguatan Kapasitas Sosial-Ekonomi Masyarakat dalam Beradaptasi Terhadap Perubahan Iklim di Pekalongan”.

Dalam mengawali program ini, telah dilakukan serangkaian kegiatan penilaian (studi) awal, pada beberapa desa sasaran baik di hulu maupun di hilir, dimana salah satu lokasi sasaran di hulu adalah Desa Kayupuring, yang selanjutnya dilakukan fasilitasi workshop perencanaan tata guna lahan secara partisipatif (*Participatory Landuse Planning/PLUP*). Workshop PLUP ini menjadi ruang perencanaan masyarakat dan stakeholder lokal dalam merumuskan kebijakan perencanaan pengelolaan tata guna lahan desa/wilayahnya.

Kegiatan PLUP ke-1 di Desa Kayupuring diselenggarakan di Ibu Kusrini, Dukuh Kayupuring pada tanggal 23 November 2021, yang dihadiri sekitar 80 orang (75 orang dari unsur masyarakat dan 5 orang dari unsur Field Facilitator), PLUP ke-2 diselenggarakan di Bapak Sobirin, Dukuh Jimat pada tanggal 26 November 2021, dihadiri sekitar 38 orang (35 orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur Field Facilitator), PLUP ke-3 diselenggarakan di Bapak Sobirin, Dukuh Jimat pada tanggal 10 Desember 2021, dihadiri 24 orang (21 orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur *Field Facilitator*) yang mewakili unsur pemerintahan desa, lembaga desa, dan kelompok masyarakat mata pencahariannya sensitif terhadap perubahan iklim.

Rangkaian kegiatan PLUP ini mencakup: (i) kajian wilayah secara cepat (*Rapid Rural Appraisal/RRR*); (ii) pelatihan dan pembekalan calon fasilitator desa, yang diselenggarakan pada 19 September 2021); (iii) rapat koordinasi dengan Pemerintahan Desa terkait penyelenggaraan PLUP; (iv) pelaksanaan workshop PLUP Desa Kayupuring.

Tujuan workshop perencanaan tata guna lahan partisipatif (PLUP) ini adalah: (i) memetakan kapasitas sumberdaya wilayah desa; (ii) merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan tata guna lahan wilayah melalui zonasi pengelolaan dan program strategis berbasis potensi desa; (iii) menentukan rumusan program prioritas penguatan kapasitas resiliensi dan *livelihood* masyarakat.

Dari penyelenggaraan workshop PLUP ini diperoleh hasil berikut:

- Rumusan visi PLUP: **"Desa Kayupuring Hasil Pertanian Meningkat, Subur, Makmur, Sejahtera"**
- Jenis SDA yang sensitif namun mempunyai nilai sangat strategis terhadap *livelihood* masyarakat, adalah hutan lindung, hutan produksi, sawah, sungai, dan tegalan/ladang.
- Ditentukannya zonasi fungsi lindung, yang mencakup: hutan lindung/rimba
- Untuk zonasi fungsi budidaya mencakup hutan produksi, tegalan/ladang dan sawah.

6 (enam) isu strategis yang dinilai menyebabkan menurunnya kapasitas sosial ekonomi masyarakat Desa Kayupuring adalah:

1. Rendahnya pendidikan dan kapasitas masyarakat bidang pertanian dan peternakan
2. Kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada petani dan sektor pertanian
3. Kelembagaan desa dan kelompok tani masih lemah
4. Menurunnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian hutan dan satwa liar
5. Terbatasnya sarana dan prasarana desa serta jaringan akses informasi masyarakat
6. Terganggunya kelestarian lingkungan akibat pencemaran, serta kurangnya perlakuan konservasi di lahan kemiringan tinggi dan sempadan mata air

KREDIT

- Narasumber/Partisipan : Cahyono (Kades Kayupuring), Untung (BPD), Sobirin, Soleha, Wasri, Suratini, Sri Rohyati, Tarmini, Karti, Sutaryah, Kusri, Castiyah, Faroyah, Rumiah, Nur Naenal, Bawon, Dasiyah, Zanifah, Warmoah, Nur Pujiasih, Wihartini, Siti Rohyati, Sarni, Carmini, Sumarni, Rahayu, Turipah, Kartiyah.
- Abdush Shomad, Achmd Sachawi, Kuwadi, Catur W., Giono, Idayati, Cholisul Marom, Anugrah Afrifiyanto, Surya Prastiono, Mustakim, Imam Slamet S.
- Kontributor & Pendukung Proses : Nofri Iswandi, Sigit Wijanarko, Arif Anshori, Emy Setya D, Okta Dwi F, Maun Kusnandar, Arif, Ranggi, M. Aminuddin
- Notulen: Achmad Sachawi
- Dokumentasi: Syarif (kepala produksi), Hadian dan Yusron (kameramen), Arif (editor)
- Fasilitator : M. Khulwani (Fasilitator Utama)
- Sigit Wijanarko, Imam Nur Huda, Muhamad Nur Cholis, Arif Ansori, Abdush Shomad, Achmd Sachawi, Kuwadi, Catur W., Giono, Idayati, Cholisul Marom, Anugrah Afrifiyanto, Surya Prastiono, Mustakim, Imam Slamet S.
- Sumber Peta : Peta Penutup Lahan LHK 2020, BIG dan Hasil olahan survei lapangan.
- Program dan Kerja sama : Program Penguatan Kapasitas Sosial-Ekonomi Masyarakat dalam Beradaptasi Terhadap Perubahan Iklim di Pekalongan; Kerja sama EFI-MCI Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, November 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
SAMBUTAN KETUA PKK DESA KAYUPURING	II
SAMBUTAN WAKIL MANAJEMEN EFI-MCI	III
RINGKASAN EKSEKUTIF	V
KREDIT	VII
DAFTAR ISI	VIII
DAFTAR TABEL.....	VIII
DAFTAR GAMBAR.....	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Kerangka konseptual.....	1
3. Tujuan dan Keluaran	7
4. Metodologi	8
BAB II GAMBARAN UMUM DESA KAYUPURING	12
1. SELAYANG PANDANG DESA KAYUPURING.....	12
2. Kondisi Geografi, Demografi & letak administrasi.....	12
3. Penggunaan lahan wilayah	13
4. Aksesibilitas wilayah	14
5. Struktur pemerintah desa Kayupuring	15
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PLUP.....	16
1. visi PLUP Desa Kayupuring.....	16
2. aset wilayah kayupuring	17
3. Perubahan Tata Guna Lahan Desa.....	23
4. Permasalahan desa Kayupuring	25
BAB IV ZONASI & ARAHAN PENGELOLAAN.....	31
1. Zonasi Pengelolaan Wilayah Kayupuring	31
2. Arahana Strategis Pengembangan Wilayah	32
3. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH	33
4. Program prioritas (jangka dekat)	35
LAMPIRAN.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tutupan Lahan Desa Kayupuring.....	13
Tabel 2. Mimpri masyarakat Desa Kayupuring berdasarkan FGD PLUP Tahun 2021	17
Tabel 3. Jenis Aset SDA Sensitif Perubahan Iklim di Desa Kayupuring.....	17
Tabel 4. Jenis pekerjaan masyarakat Kayupuring yang Sensitif terhadap Perubahan Iklim	19
Tabel 5. Kelompok rentan terhadap perubahan iklim Desa Kayupuring.....	19
Tabel 6. Sumberdaya Buatan Yang terdampak Perubahan Iklim Desa Kayupuring	20
Tabel 7. Modal sosial (SDS) Masyarakat yang mendukung resilensi masyarakat Desa Kayupuring.	21
Tabel 8. Jenis Komoditas (SDE) Yang diusahakan Masyarakat Desa Kayupuring	21
Tabel 9. Jenis Barang/Komoditas Yang Dibeli (dikonsumsi setiap hari) oleh Masyarakat Kayupuring..	22
Tabel 10. Perubahan Sumberdaya Alam akibat perubahan iklim	24
Tabel 11. Hasil Penilaian (Skoring) Prioritas Akar Masalah Desa Kayupuring	30
Tabel 12: program/kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat bidang pertanian dan peternakan	33
Tabel 13: Program Mendorong Kebijakan pemerintah Agar berpihak pada petani dan sektor pertanian	33
Tabel 14: Program Meningkatkan kapasitas Kelembagaan desa dan kelompok tani.....	34
Tabel 15: Program Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian hutan dan satwa liar ...	34
Tabel 16: Program meningkatkan sarana dan prasarana desa serta jaringan akses informasi masyarakat	34
Tabel 17: Program meningkatkan kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan, konservasi lahan dan mata air.....	35
Tabel 18. Program yang perlu dilaksanakan di tahun 2022	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Bagan Alir Proses Workshop PLUP.....	9
Gambar 2: Peta Tata Guna Lahan Desa Kayupuring	14
Gambar 3: Struktur Pemerintah Desa Kayupuring	15
Gambar 4: Peta Visi Masyarakat Desa Kayupuring	16
Gambar 5: Peta Perubahan Penutupan Lahan 1990, 2000, 2021 Desa Kayupuring	23
Gambar 6: Diagram isu strategis Desa Kayupuring.....	30
Gambar 7: Peta Zonaasi Arah Pengelolaan Tata Guna Lahan Desa Kayupuring	31
Gambar 8: Diagram Arah Strategis Pengembangan Wilayah Kayupuring.....	32

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan hasil analisis *Rapid Rural Appraisal* (RRA)¹ di 4 (empat) desa wilayah hulu yang mencakup Desa Yosorejo, Simego, Tologohendro, dan Kayupuring Kecamatan Petungkriyono beserta 2 (dua) desa di wilayah tengah yakni Desa Batusari dan Jolotigo Kecamatan Talun menunjukkan bahwa perubahan iklim terjadi di kawasan hulu dan tengah. Situasi ini memberikan pengaruh terhadap menurunnya kesejahteraan masyarakat, situasi lain juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam/lahannya.

Isu-isu yang ada di daerah hulu dan tengah adalah masalah meningkatnya kebutuhan lahan pertanian, kesadaran budidaya pertanian yang ramah lingkungan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan akses kesehatan, aksesibilitas dan jaringan jalan, serta lemahnya kelembagaan petani serta soal kebijakan pemerintah daerah yang (dinilai) belum optimal.

Situasi ini menunjukkan bahwa untuk membangun kapasitas resiliensi masyarakat, dibutuhkan sebuah terobosan kebijakan perencanaan pengelolaan tata guna lahan partisipatif, komprehensif, yang terintegrasi (antar sector), dan memperhatikan keserasian fungsi lindung dan budidaya.

Perencanaan pengelolaan tata guna lahan secara partisipatif (PLUP), adalah upaya dari masyarakat dalam merumuskan kebijakan perencanaan pengelolaan tata guna lahan desa untuk memperkuat kapasitas resiliensi masyarakat guna merespon perubahan iklim yang semakin tidak menentu, sehingga kesejahteraan masyarakat tetap terwujud.

2. KERANGKA KONSEPTUAL

2.1. PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAPSITAS RESILIENSI

Istilah pengembangan masyarakat di Indonesia sudah cukup populer sejak tahun 70-an, dengan berbagai ragam penyebutan istilah dan terminologinya.

PBB mengartikan pembangunan masyarakat, sebagai proses melalui usaha dan prakarsa masyarakat sendiri maupun kegiatan pemerintahan dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan budaya. Suharyanto dalam teori pembangunan masyarakat desa (*Rural Community Development*) merujuk pada upaya perbaikan kondisi ekonomi, sosial

¹Earthworm Foundation Indonesia, September 2021

dan budaya masyarakat yang secara umum menggantungkan hidupnya dari pengelolaan sumberdaya alam. Sementara Arif Budiman, menilai bahwa keberhasilan pembangunan disamping memperhatikan pada pertumbuhan ekonomi (yang tinggi) juga memperhatikan pada keberlanjutan yang didalamnya menyaratkan pada tidak terjadinya dan/bertambahnya kesenjangan sosial (alienasi dan dehumanisasi) serta tidak dilakukannya perusakan terhadap sumberdaya alam (eksploitasi).

Resiliensi sebagai konsep pengembangan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas individu, kelompok atau masyarakat yang memungkinkan untuk menghadapi, meminimalkan, menghilangkan, bahkan mencegah (potensi) dampak dan risiko yang (berpotensi) merugikan keberlanjutan hidupnya, sehingga sehingga apa yang menjadi harapan dan kebutuhan masyarakat dapat terwujud.

Dalam konteks program adaptasi perubahan iklim, resiliensi dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan ketahanan kelompok petani/masyarakat yang rentan (potensi) terpapar terhadap perubahan iklim yang terjadi, sehingga mampu menganggulangi permasalahan yang terjadi dan dapat beradaptasi atas situasi perubahan-perubahan (lingkungan), dan masyarakat tetap dapat memenuhi livelihoodnya secara berkelanjutan.

Dalam membangun resiliensi komunitas tidak dapat dilepaskan dengan konsep pengembangan masyarakat. Indikator komunitas resilen, seperti (i) mempunyai kepercayaan diri dan motivasi yang kuat; (ii) Memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis mendayagunakan SDA/lahannya dengan baik; (iii) Mempunyai aset lahan yang produktif dengan kepastian legalitas penguasaan; (iv) Pendapatan yang cukup; (v) Dukungan kelembagaan sosial yang memadai; (vi) Mempunyai akses informasi yang mudah, jaringan pasar serta akses permodalan serta dukungan kemitraan; dan (vii) adanya dukungan kebijakan pemerintah yang berpihak; adalah indikator-indikator yang penanda bahwa komunitas tersebut resilen.

Dalam konsep resiliensi, EF Indonesia menggunakan 3 (tiga) jenjang sasaran, yakni, sasaran primer, sekunder dan sasaran tersier.

Sasaran primer, fokus pada upaya memperkuat kapasitas individu yang mencakup kepercayaan diri², motivasi³ dan kapasitas individu⁴. Sasaran sekunder fokus pada penguatan Kelompok dan Kelembagaan yang mengurus kelompok masyarakat, dalam hal ini yang mata pencahariannya sensitive terhadap dampak perubahan iklim; misalnya kelompok petani secara umum⁵, sementara sasaran tersier fokus pada kemampuan kelompok masyarakat dalam mendorong kebijakan pemerintah agar mendukung (pemecahan masalah dan pencapaian tujuan) kelompok masyarakat⁶.

Ketiga sasaran ini mesti dipenuhi untuk mewujudkan keberdayaan dan kapasitas resiliensi sehingga terwujud masyarakat yang berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

2.2. PENDEKATAN DAN PRINSIP *SUSTAINABLE LIVELIHOOD*

Gagasan dan konsep penghidupan yang layak (*sustainable livelihood-SL*) tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Robert Chambers di pertengahan 1980-an, yang kemudian dikembangkan oleh Chambers, Conway, dan para ahli yang lain di awal tahun 1990-an. Konsep tersebut kemudian diadopsi oleh banyak lembaga internasional sebagai alternatif

2 Ego merupakan identitas dan karakter pribadi sebagai petani, sehingga mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap sesuatu baik potensi atau yang manifest yang melekat pada individu petani.

3 "Mengungkit" dorongan berubah dari diri petani untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, dalam hal ini membangkitkan rasa kepercayaan diri untuk berubah guna mencapai suatu tujuan hidup petani baik sebagai individu atau sebagai anggota rumah tangga petani (intrinsik dan ekstrinsik).

4 Pengetahuan dan ketrampilan serta sikap petani, dengan mendorong peningkatan kapasitas berupa pengetahuan dan ketrampilan produksi agar mampu mendayagunakan sumberdaya alam dan lahan yang dimiliki dan/atau dikuasainya agar menjadi produktif, optimal, berdaya guna dan multi guna sehingga mendukung livelihood diri dan keluarganya

5 Termasuk kapasitas organisasi dalam berjejaring dan bermitra baik ditingkat komunitas sendiri maupun dengan jaringan pasar yang lebih luas

6 Kapasitas dalam mendorong kebijakan pemerintah yang mendukung petani dan sector pertanian, seperti kebijakan pengolahan, agroindustri, kebijakan perdagangan (trade policy), seperti perlindungan produk petani, perlindungan harga jual, akses permodalan dan pemasaran dan lain-lain.

pendekatan pembangunan pada awal 1990an yang dipicu dari maraknya kasus kelaparan dan kerawanan pangan di sejumlah negara pada tahun 1980-an⁷

Chambers dan Conway dalam *"Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st Century"* (1991: i) memaknai livelihood sebagai orang-orang dengan kemampuan dan cara hidup mereka yang didalamnya termasuk juga makanan, pendapatan dan aset (baik tangible assets berupa sumberdaya dan perbekalan, dan intangible assets berupa klaim dan akses).

Ashley dan Carney, dalam *Sustainable Livelihoods: Lessons from Early Experience* (1999) mengemukakan prinsip-prinsip sustainable livelihood sebagai berikut: Bahwa dalam kegiatan pembangunan yang fokus pada kemiskinan harus:

- Berpusat pada manusia/masyarakat (*people-centered*). Bahwa upaya mengurangi kemiskinan yang berkelanjutan akan tercapai hanya jika ada dukungan eksternal yang fokus pada apa yang penting bagi orang-orang, memahami perbedaan antara kelompok orang dan bekerja dengan mereka dengan cara yang sama dan sebangun dengan strategi penghidupan mereka saat ini, lingkungan sosial dan kemampuan untuk menyesuaikan.
- Responsif dan partisipatif. Bahwa dalam pendekatan sustainable livelihood, suatu intervensi yang dilakukan adalah respon atas situasi/problem yang terjadi dimasyarakat dan lingkungan sekitarnya. Partisipatif merujuk pada menempatkan orang miskin itu sendiri-lah yang harus menjadi aktor kunci dalam mengidentifikasi dan mengatasi prioritas penghidupan. Orang luar harus terlibat dalam proses yang memungkinkan mereka untuk mendengarkan dan menanggapi orang miskin.
- Multilevel. Bahwa masalah kemiskinan adalah masalah yang saling terkait dan bertingkat, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan secara berjenjang dan bertingkat. Memastikan bahwa kegiatan di tingkat mikro dapat memberikan informasi pada penyusun kebijakan yang lebih tinggi, menciptakan lingkungan yang efektif, dan bahwa struktur dan proses di tingkat makro juga mendukung masyarakat untuk membangun kekuatan mereka sendiri.

⁷ Haidar, "Sustainable Livelihood Approach: The Framework, Lessons Learnt from Practice and Policy Recommendations," 2009)

- Kemitraan. Bahwa mengingat isu kemiskinan banyak factor yang mempengaruhi, maka diperlukan kemitraan dan pelibatsertaan para pihak, baik dari sector public (pemerintah), private (Perusahaan) hingga civil society (akademisi, LSM)
- Berkelanjutan. Bahwa upaya mewujudkan keberlanjutan livelihood masyarakat, perlu menyelaraskan antara aspek ekonomi, sosial (termasuk kelembagaan komunitas) dan ketersediaan sumberdaya alam secara lintas generasi.

2.3. PENTAGONAL ASSETS: KOMPONEN *SUSTAINABLE LIVELIHOOD*

Merujuk pada konsep dan definisi tentang sustainable livelihood yang dikemukakan oleh Chambers dan Conway, yang antara lain menitikberatkan pada aspek kemampuan, aset (tangible dan intangible), akses, dan pendapatan, yang oleh DFID dikembangkan menjadi kerangka kerja livelihood. Kerangka kerja livelihood ini mengidentifikasi 5 (lima) kategori aset utama yang selanjutnya disebut juga sebagai 5 (lima) modal sumber penghidupan yang berkelanjutan.

Kelima modal tersebut adalah: (i) modal sumberdaya alam; (ii) modal pengetahuan dan kapasitas masyarakat (*human capital*); (iii) sumberdaya kelembagaan komunitas/masyarakat (*social capitals*); (iv) modal fisik/sarana dan prasarana wilayah serta jaringan (*infrastructures and utilities*); dan (v) sumberdaya ekonomi dan keuangan masyarakat (*economic and financial capitals*)⁸. Kelima aset tersebut saling terkait, dan entitasnya menjadi faktor pengaruh kualitas *livelihood* suatu masyarakat.

2.4. KEBIJAKAN PENATAAN RUANG & PLUP.

UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, mengamanatkan bahwa dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan wilayah harus memperhatikan pola ruang, yakni kebijakan pembangunan yang menjaga keseimbangan antara fungsi budidaya dan lindung. Lebih lanjut dalam UU ini disebutkan bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, maka diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam peraturan ini merentang dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang.

⁸ DFID, 1999

Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang ini diatur sedemikian rupa dalam pasal 65, bahwa: (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat; (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui: (a) Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; (b) Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan (c) Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Partisipasi masyarakat ini selaras dengan semangat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana desa saat ini perlu menjadi garda depan dalam proses pembangunan wilayah desa). Paradigma dari “membangun desa” menjadi “desa membangun” menyaratkan kesiapan aparatur pemerintahan desa berserta kelembagaannya dan partisipasi aktif masyarakatnya dalam mengelola sumberdaya yang ada di wilayahnya secara bijak dan arif, dari pengelolaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan, modal social hingga sumberdaya ekonominya, sebagai modal masyarakat/pemerintahan desa untuk memajukan daerahnya dan memakmurkan masyarakat disekitarnya.

Untuk menjaga keseimbangan dalam proses pembangunan kawasan perdesaan, maka diperlukan kebijakan yang mendukung keserasian dan keseimbangan fungsi ruang (budidaya dan lindung). Dan untuk mewujudkan agenda tersebut, dibutuhkan inisiasi perencanaan pengelolaan sumberdaya alam/kawasan hutan yang terintegrasi, melibatkan partisipasi masyarakat dan pemerintahan desa serta para pemangku kepentingan pembangunan lainnya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumberdaya alamnya secara lintas generasi.

Participatory Land Use Planning (PLUP) atau perencanaan tata guna lahan secara partisipatif konsep perencanaan tata guna lahan pada satuan wilayah yang diselenggarakan secara partisipatif guna merumuskan arahan pengelolaan sumberdaya alam/lahan sesuai dengan peruntukannya, guna mewujudkan keserasian pengelolaan fungsi dan mendukung resiliensi dan kesejahteraan masyarakat disekitarnya.

Kegiatan perencanaan tata guna lahan ini diselenggarakan dengan pendekatan partisipatif (*participatory approach*), dengan metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*) yakni sebuah metode pengkajian sumberdaya alam (perdesaan) dengan melibatkan pemangku kepentingan atas sumberdaya yang dipetakan secara partisipatif khususnya masyarakat yang tinggal dalam wilayah yang bersangkutan.

Dalam proses penyelenggaraan workshop PLUP, peran orang luar sebagai fasilitator, yang membantu masyarakat/stakeholder mengidentifikasi, merumuskan dan menyusun langkah-langkah proses kajian, sementara masyarakat sebagai narasumbernya.

Metode Diskusi kelompok terfokus (FGD), *check* dan *recheck* hasil FGD dilakukan melalui pleno, sehingga hasil diskusi kelompok terklarifikasi (dan terkonfirmasi) oleh kelompok lain sehingga menghasilkan data yang berkeandalan.

3. TUJUAN DAN KELUARAN

Tujuan kegiatan penyelenggaraan perencanaan tata guna lahan partisipatif (PLUP) ini adalah:

1. Memetakan kapasitas sumberdaya wilayah desa/kelurahan.
2. Merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan tata guna lahan wilayah melalui zonasi pengelolaan dan program startegis berbasis potensi desa/kelurahan.
3. Mendapatkan rumusan program prioritas penguatan kapasitas resiliensi dan livelihood masyarakat

Sementara keluaran dari kegiatan PLUP ini adalah:

1. Dokumen rencana pengelolaan tata guna lahan secara partisipatif pada skala desa/kelurahan.
2. Arah kebijakan dan strategi pengelolaan tata guna lahan desa/komunitas yang memperkuat kapasitas wilayah dalam merespon dampak perubahan iklim.
3. Program prioritas dan program alternatif pengembangan usaha komunitas yang memperkuat resiliensi dan livelihood masyarakat.

4. METODOLOGI

4.1. METODE YANG DIGUNAKAN

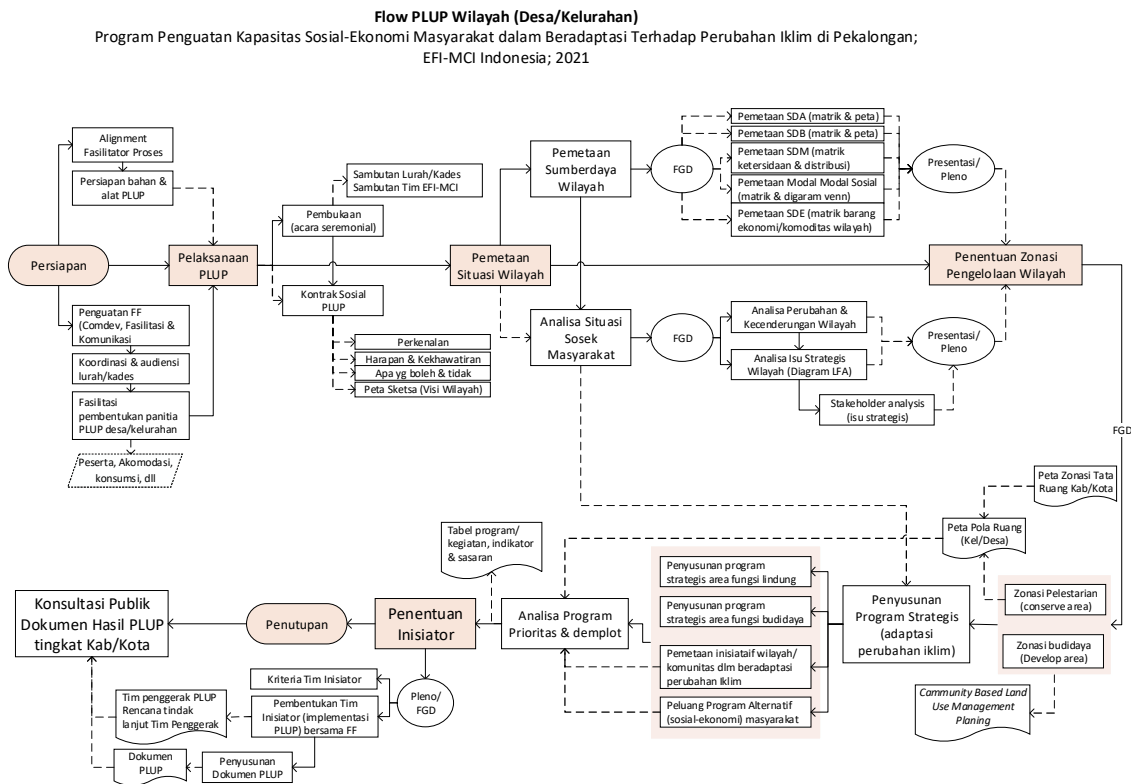
- Desktop study, dilakukan dengan melakukan kajian data pustaka dan analisis data citra satelit dari tutupan lahan (*land cover*) wilayah desa dan/atau kecamatan dalam bentang alam wilayah kabupaten.
- *Rapid Rural Appraisal (RRA)*, dilakukan wawancara, observasi wilayah, diskusi dan konsultasi hasil olahan peta (desktop study) kepada pemangku kepentingan dan narasumber relevan⁹.
- Kontrak sosial, yakni upaya membangun kesepahaman dan kesepakatan atas perlu/tidaknya diselenggarakannya workshop, dengan tetap menggunakan persetujuan awal dari pemerintahan desa dan masyarakat/desa (dengan prinsip FPIC).
- *PRA (Participatory Rural Appraisal)*, yakni sebuah metode pengkajian sumberdaya desa bersama masyarakat/kelompok masyarakat.
- Diskusi Kelompok Terfokus (FGD); dalam proses fasilitasi PLUP, peran orang luar adalah sebagai fasilitator, membantu mengidentifikasi, merumuskan dan menyusun langkah-langkah proses kajian dengan masyarakat sebagai narasumber, sekaligus pelaku proses pengkajian dan pelaksana keputusan yang dihasilkan. Dalam proses FGD dilakukan pula check dan recheck hasil FGD melalui pleno kelompok dan antar kelompok diskusi, sehingga hasil diskusi kelompok terklarifikasi (dan terkonfirmasi) oleh kelompok diskusi lainnya.
- Bahan dan Peralatan (tools); perlengkapan yang digunakan dalam proses fasilitasi workshop PLUP ini antara lain: (i) Peta dasar land use desa; (ii) ATK, berupa kertas plano, selotip kertas, spidol warna dan metacard (potongan kertas ukuran tertentu untuk mendokumentasikan gagasan masyarakat).
- Dokumentasi, hasil fasilitasi proses workshop dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan komunitas yang menjadi pegangan masyarakat dan para pemangku kepentingan yang relevan.

⁹ Dalam kajian data primer ini, dilakukan pula Field Diagnostic, sebuah metode diagnosis untuk menilai perspsi masyarakat terkait situasi wilayahnya, terkait dengan livelihood dan resiliensi rumah tangga petani.

- Konsultasi publik, yakni sebuah metode penyampaikan isi dokumen hasil dari workshop PLUP kepada para pemangku kepentingan untuk mendapatkan feedback, respon dan koreksi (jika diperlukan) serta untuk mengembangkan program kemitraan/kerja sama (kolaborasi) lebih lanjut.

4.2. ALUR PROSES PLUP

Berikut adalah diagram proses fasilitasi workshop PLUP (*Participatory Landuse Planing*).



Gambar 1: Bagan Alir Proses Workshop PLUP

Berikut adalah keterangan bagan alir proses fasilitasi workshop PLUP:

1. Persiapan, mencakup:

- Penguatan kapasitas fasilitator lapangan (*Field Facilitators*) terkait pengembangan masyarakat, pendekatan partisipatif, teknik fasilitasi partisipatif dan komunikasi.
- Audiensi dan presentasi kepada stakeholder kunci (kelurahan/desa)
- Fasilitasi diskusi pembentukan tim pelaksana PLUP tingkat kelurahan/desa bersama pemerintah kelurahan/desa.

- Identifikasi dan penentuan calon partisipan, penentuan tempat, konsumsi, perlengkapan termasuk alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses workshop PLUP.
2. Pelaksanaan, rangkaian acara proses workshop PLUP meliputi:
- 2.1. Pembukaan
- Pembukaan acara workshop dilakukan oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan sambutan dari kepala desa/lurah dilanjutkan dengan sambutan dari wakil Tim EFI-MCI.
- 2.2. Kontrak sosial, proses ini mencakup:
- Perkenalan, yakni proses membangun keakraban dan saling mengenal antar partisipan dan antar fasilitator dan partisipan.
 - Diskusi kelompok terfokus, yang mencakup: (i) diskusi kelompok harapan dan kekhawatiran; (ii) diskusi kelompok aturan proses (apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam proses diskusi; (iii) diskusi kelompok waktu, yakni kelompok yang membahas jadwal/tata waktu selama kegiatan workshop PLUP; dan (iv) diskusi kelompok peta sketsa visi, yakni kelompok yang membahas peta sketsa visi desa/kelurahan.
- 2.3. Pemetaan potensi wilayah, mencakup:
- Diskusi kelompok pemetaan sumberdaya alam (SDA);
 - Diskusi kelompok pemetaan sumberdaya manusia (SDM), terutama tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan masyarakat;
 - Diskusi kelompok pemetaan jenis sarana dan prasarana wilayah (sumberdaya buatan/SDB);
 - Diskusi kelompok jenis sumberdaya sosial/kelembagaan masyarakat (sumberdaya sosial/SDS), termasuk kelompok/lembaga masyarakat, formal atau nonformal; dan
 - Diskusi kelompok jenis sumberdaya ekonomi (SDE), yang meliputi jenis komoditas yang dihasilkan (produksi) dan dijual masyarakat, termasuk lembaga keuangan yang diakses masyarakat.
- Hasil diskusi kelompok kemudian diplenokan kepada seluruh peserta workshop PLUP yang dipandu oleh fasilitator.
- 2.4. Pemetaan dan analisis masalah wilayah, dalam proses ini, yang dilakukan adalah:
- Diskusi kelompok perubahan dan kecenderungan wilayah desa/kelurahan dengan merujuk pada jenis SDA penting dan sensitive terhadap perubahan iklim.
 - Diskusi kelompok identifikasi masalah dan analisis isu strategis wilayah

- Diskusi kelompok analisa para pemangku kepentingan atas isu strategis wilayah

2.5. Penentuan/pemetaan zonasi pengelolaan wilayah (FGD), mencakup:

- Diskusi kelompok pemetaan dan penentuan zonasi wilayah untuk fungsi perlindungan
- Diskusi kelompok pemetaan dan penentuan zonasi wilayah untuk fungsi budidaya

2.6. Penyusunan program strategis wilayah, yang mencakup:

- Diskusi kelompok program strategis pada zona lindung
- Diskusi kelompok program strategis pada zona budidaya
- Diskusi kelompok program strategis terkait dengan livelihood masyarakat dan kebijakan yang mendukung adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim
- Diskusi kelompok analisa program prioritas demplot
- Diskusi kelompok identifikasi inisiatif masyarakat yang sudah dilakukan
- Diskusi kelompok penentuan program prioritas untuk satu tahun kedepan

Hasil diskusi kelompok kemudian diplenokan kepada seluruh peserta workshop PLUP yang dipandu oleh fasilitator

2.7. Penentuan Tim Penggerak (inisiator PLUP), tahapan yang dilakukan antara lain:

- Diskusi penentuan kriteria anggota tim penggerak;
- Diskusi pemilihan anggota tim penggerak dan penyusunan rencana tindak lanjut (termasuk penyusunan dokumen PLUP untuk pelaksanaan konsultasi publik)

2.8. Penutup (doa dan foto bersama)

BAB II GAMBARAN UMUM DESA KAYUPURING

1. SELAYANG PANDANG DESA KAYUPURING

Pada zaman dahulu seorang pengembara bernama Kyai Suro Joko Puring (Kyai adalah sebutan untuk orang yang di tuakan). Suro Joko Puring merupakan paman dari tokoh Legendaris “Angling Darma”. Meskipun Kyai Suro Joko Puring adalah paman dari Angling Darma, tetapi dalam kenyataanya mereka justru saling bermusuhan.

Suatu hari terjadilah pertempuran antara Kyai Suro Joko Puring melawan Angling Darma. Setelah pertempuran tersebut akhirnya mereka berdamai dan bersepakat untuk berkuasa di masing-masing wilayahnya. Kyai Suro Joko Puring berkuasa di sebelah utara yang saat ini disebut dengan “Kayupuring” dan Angling Darma di wilayah selatan yang dikenal dengan nama Derma. Dari kedua wilayah tersebut terdapat bukit yang dikenal dengan nama stipis yang saat ini menjadi wilayah perbatasan antara Desa Kayupuring dan Desa Kasimpar.

2. KONDISI GEOGRAFI, DEMOGRAFI & LETAK ADMINISTRASI

2.1. KONDISI GEOGRAFIS KAYUPURING

Desa Kayupuring terletak di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. Wilayah Desa Kayupuring merupakan daerah pegunungan yang berada di ketinggian 600-1.000 Mdpl. Sebagian besar wilayah desa berada termasuk k dalam kawasan pegunungan Dieng. Wilayah Desa Kayupuring terdiri dari 4 dusun yakni Dusun Sokokembang, Dusun Tembelan, Dusun Tinalum, dan Dusun Sonokembang. Apabila dilihat secara titik koordinat, Desa Kayupuring terletak diantara 7°10'48.0"S - 109°42'29.0"E.

2.2. DEMOGRAFI KAYUPURING

Berdasarkan data dari Pemerintah Desa Kayupuring perbulan Agustus 2021 jumlah penduduk sebanyak 1.363 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 678 Jiwa dan perempuan sebanyak 685 jiwa. Jumlah kepala keluarga Desa Kayupuring yakni sebanyak 457 KK. Berdasarkan jenis pekerjaanya, masyarakat Desa Kayupuring berporfesi sebagai petani, buruh tambang, pedagang, Pegawai Negeri Sipil, dan lain sebagainya.

2.3. LETAK ADMISITRASI KAYUPURING

Secara administrasi, wilayah Desa Kayupuring berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kecamatan Talun
- Sebelah Timur : Desa Tlogohendro dan Kabupaten Batang
- Sebelah Selatan : Desa Kesimpar
- Sebelah Barat : Kecamatan Doro

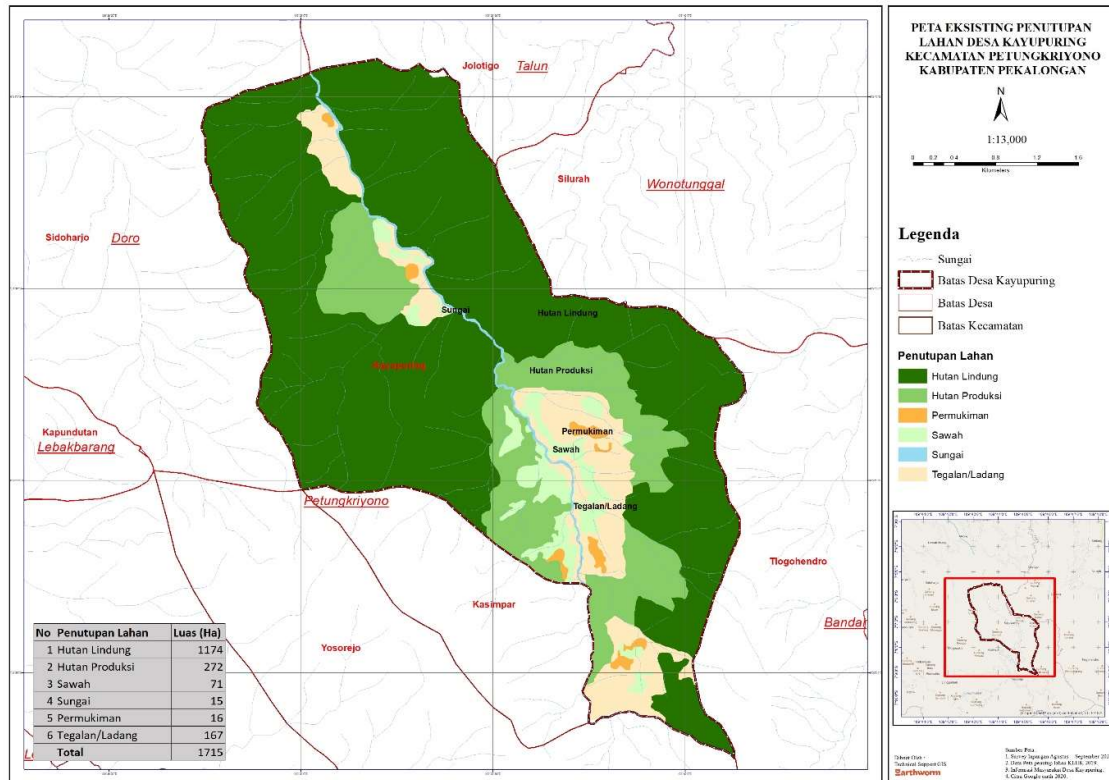
3. PENGGUNAAN LAHAN WILAYAH

Berdasarkan hasil analisis yang bersumber dari data survey lapangan, data peta tutupan lahan KLHK 2019, Informasi narasumber, dan citra satelit tahun 2020 dihasilkan bahwa jenis tata huna lahan di Desa Kayupuring dibagi menjadi 6 (enam) jenis tutupan lahan yaitu hutan lindung, hutan produksi, sawah, sungai, permukiman, dan tegalan/ladang.

Dari jenis tutupan lahan tersbut hutan lindung menjadi jenis tutupan lahan terbesar di Desa Kayupuring yakni seluas 1.174 ha, disusul oleh hutan produksi yakni seluas 272 ha. Tegalan/ladang menjadi jenis tutupan lahan terluas di Desa Kayupuring yakni seluas 167 ha. Jenis tutupan lahan lahinya yaitu sawah seluas 71 ha, permukiman 16 ha, dan sungai 15 ha. Selengkapnya data tutupan lahan Desa Kayupuring disajikan pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 1. Tutupan Lahan Desa Kayupuring

No	Jenis Tata Guna Lahan	Luas (Ha)	Jenis Penggunaan Lahan Saat ini
1	Tegalan/ Ladang	± 170	Tanaman Kayu sengon, Sayuran, dll
2	Hutan Lindung	± 456	Hutan dan pegunungan yang ditumbuhi tanaman kayu besar, tersebar mengelilingi Desa Kayupuring
3	Hutan Produksi	± 200	Tanaman Pinus milik perhutani dan beberapa kayu produksi lainnya, ada juga yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dengan ditumpangsari dengan tanaman kopi ataupun sayuran
4	Sawah	± 71	Tanaman Padi dan beberapa jenis sayuran seperti cabe, tomat dan yang lainnya ditanam disawah desa kayupuring
5	Pemukiman	± 18	Pemukiman, warung usaha masyarakat, Kandang ternak, fasilitas umum, dll
6	Perkebunan	± 151	Tanaman kopi, kapulaga, aren, bamboo, dll



Gambar 2: Peta Tata Guna Lahan Desa Kayupuring

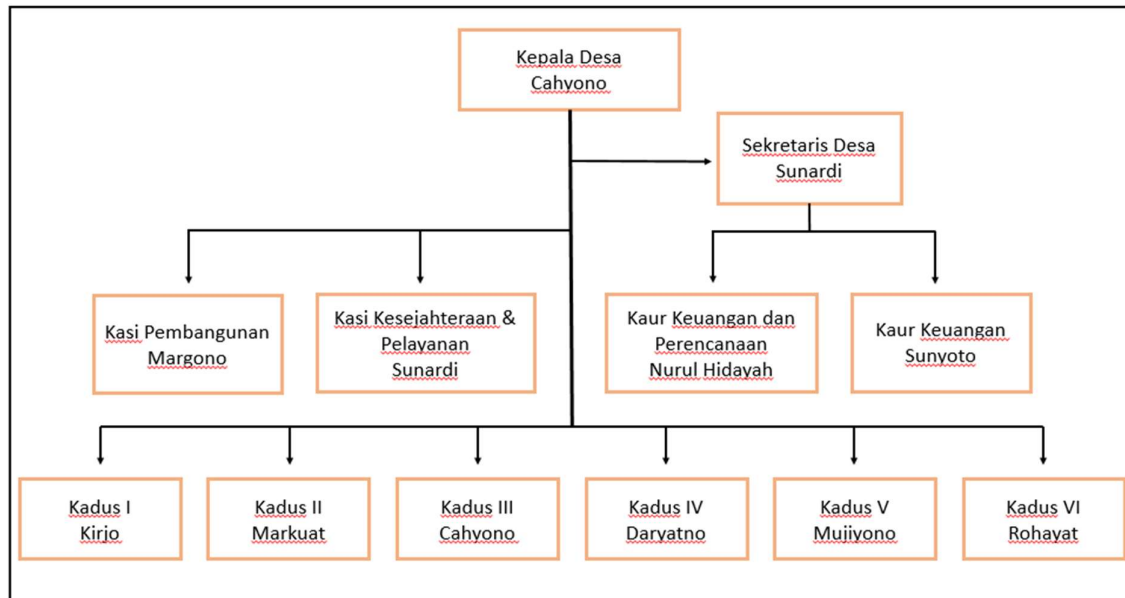
4. AKSESIBILITAS WILAYAH

Aksesibilitas dapat dijadikan sebagai ukuran untuk kemudahan dalam mencapai atau mendapatkan bawang dan jasa yang diperlukan. Kemudahan dalam aksesibilitas juga dapat mendorong perekonomian di perdesaan. Apabila dilihat dari aksesibilitasnya Desa Kayupuring memiliki tingkat kemudahan yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jarak ke beberapa pusat-pusat pelayanan yaitu sebagai berikut:

- Jarak ke pasar terdekat sekitar 15 km, (Pasar Kecamatan Doro).
- Jarak ke Ibukota Kecamatan, sekitar 9 km, dengan waktu tempuh sekitar 20 menit.
- Jarak ke Ibukota Kabupaten, sekitar 30 km, dengan waktu tempuh sekitar 1 jam.
- Jarak ke Ibukota Provinsi, sekitar 112 km, dengan waktu tempuh sekitar 4 jam.

5. STRUKTUR PEMERINTAH DESA KAYUPURING

Berikut adalah Struktur Pemerintah Desa Kayupuring berdasarkan Peraturan Desa Kayupuring, Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.



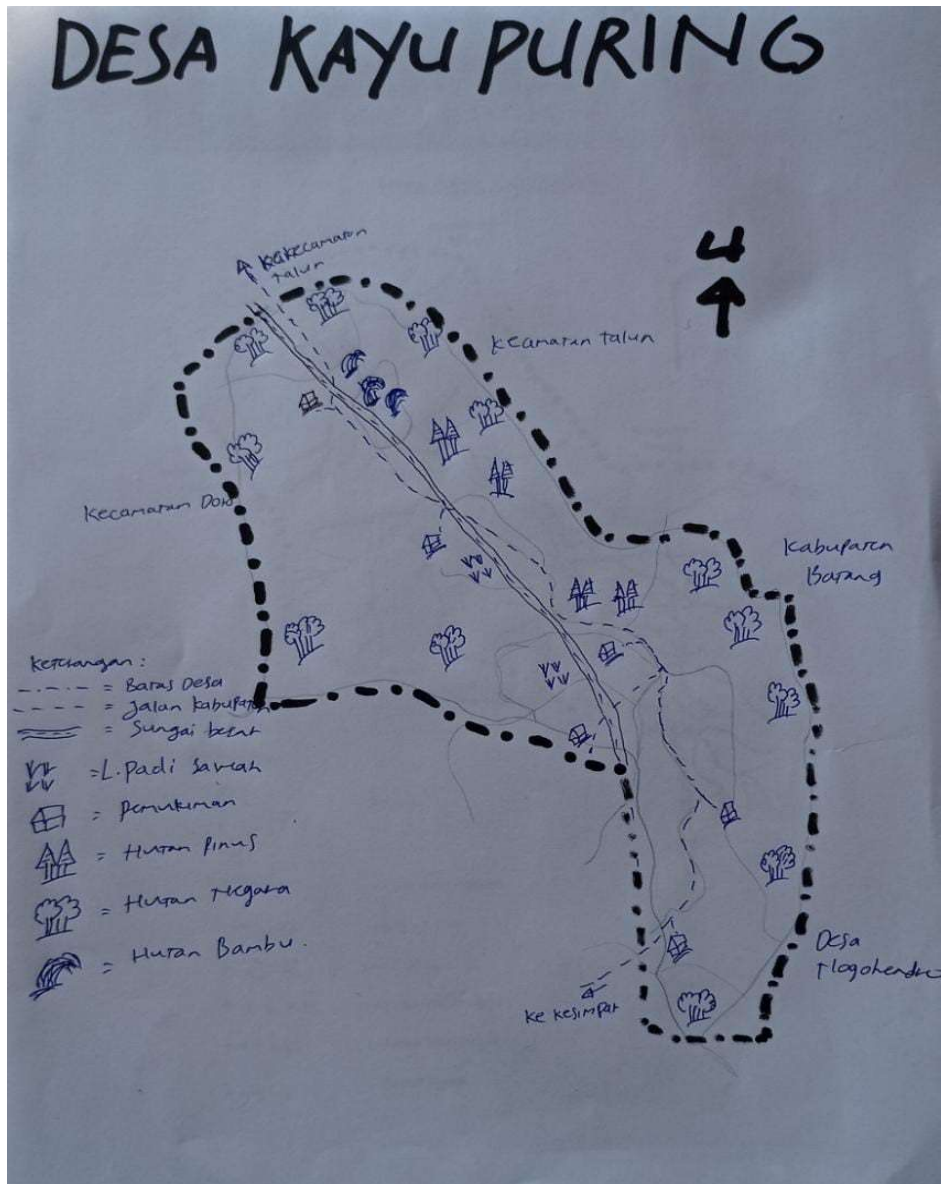
Gambar 3: Struktur Pemerintah Desa Kayupuring

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PLUP

1. VISI PLUP DESA KAYUPURING

Hasil diskusi permusan visi PLUP di Desa Kayupuring diperoleh rumusan visi: **"Desa Kayupuring Hasil Pertanian Meningkat, Subur, Makmur, Sejahtera"** yang dituangkan dalam

Selanjutnya visi masyarakat Desa Kayupuring dituangkan dalam peta sketsa dan keterangan dalam tabel dibawah.



Gambar 4: Peta Visi Masyarakat Desa Kayupuring

Tabel 2. Mimpi masyarakat Desa Kayupuring berdasarkan FGD PLUP Tahun 2021

No	Harapan / Mimpi Warga Penggunaan Lahan Desa Kayupuring
1	Mengembalikan lahan sawah yang berubah menjadi lahan sengon.
2	Meningkatkan kualitas tanah sawah agar kembali subur
3	Adanya perbaikan jalan desa
4	Hasil pertanian meningkat
5	Pendapatan masyarakat meningkat
6	Subur makmur sejahtera
7	Sumber pendapatan masyarakat yang jelas
8	Mata pencaharian yang jelas
9	Peternakan dan pertanian yang maju dan berhasil.
10	Penghasilan meningkat
11	Tanah kembali subur
12	Hasil panen meningkat dan harga bagus

2. ASET WILAYAH KAYUPURING

Untuk menilai kapasitas wilayah, dilakukan pemetaan aset desa sebagai modal sebuah wilayah dalam mengembangkan wilayahnya. Asset wilayah yang dipetakan mencakup 5 aset (*asset pentagonal*) yang mempengaruhi *livelihood* masyarakatnya. Dalam konteks PLUP in, asset yang dipetakan adalah asset wilayah (desa) yang sensitif (terpapar) terhadap perubahan iklim.

2.1. SUMBER DAYA ALAM DESA KAYUPURING

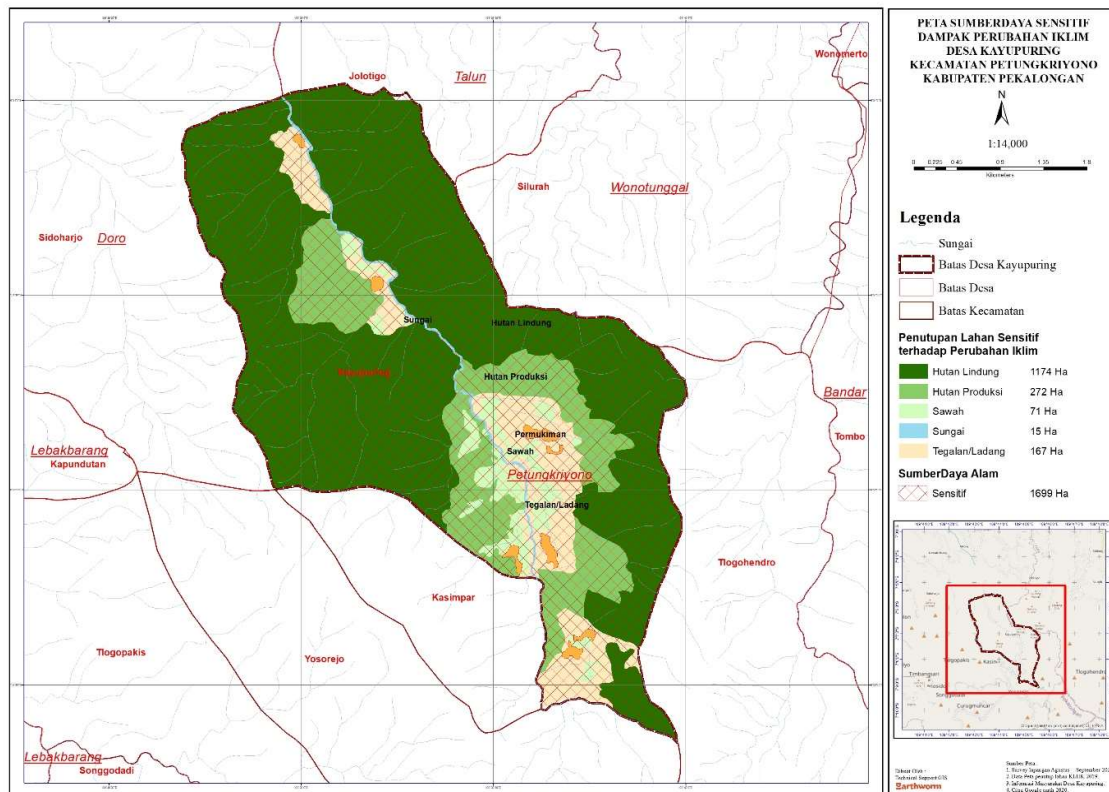
Berdasarkan pemetaan sumberdaya alam yang dilakukan dalam PLUP diperoleh beberapa jenis sumberdaya alam yang ada di Desa Kayupuring diantaranya adalah mata air, sungai, hutan produksi, hutan lindung, hutan bambu, sawah, tegalan/ladang, dan satwa. Berikut adalah tabel beberapa jenis sumberdaya alam yang sensitif terhadap perubahan iklim di Desa Kayupuring.

Tabel 3. Jenis Aset SDA Sensitif Perubahan Iklim di Desa Kayupuring

No	Jenis SDA	Jml	Luas	Lokasi (Dusun)	Keterangan
1	Mata Air	21		Mengelilingi Desa	Debit mata air berkurang (musim kemarau)
2	Sungai	5	15 Ha	Sungai Welo	Penyempitan bibir sungai dan pencemaran air
3	Hutan Lindung		1174 Ha	Mengelilingi Desa	Pemanfaatan SDA yang tidak bertanggungjawab
4	Hutan Produksi		272 Ha	Mengelilingi Desa	Pemanfaatan SDA yang tidak bertanggungjawab

5	Hutan Bambu	4		Seluruh Desa	Penebangan liar tanaman bambu
6	Sawah		71 Ha	Seluruh Desa	Sering terjadi longsor dan perubahan lahan
7	Tegalan/Ladang		167 Ha	Seluruh Desa	Sering terjadi longsor dan kualitas tanah yang semakin buruk
8	Satwa	<100		Seluruh Desa	Macan Tutul, Macan Kumbang, Elang Jawa, Babi Hutan, Kijang, Owa Jawa, Kera, Ular Sanca

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, hutan menjadi jenis tutupan lahan yang memiliki sensitifitas terluas terhadap perubahan iklim yakni seluas 1.174 ha. Selanjutnya disusul jenis tutupan lahan hutan produksi seluas 272 ha, tegalan/ladang seluas 167 ha, sawah 71 ha, dan sungai seluas 15 ha. Berikut adalah peta sebaran jenis sumberdaya yang sensitif terhadap perubahan iklim di Desa Kayupuring.



Gambar 5: Peta SDA Sensitif terhadap Perubahan Iklim Desa Kayupuring

2.2. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DESA KAYUPURING

Berdasarkan hasil pemetaan PLUP, jenis profesi yang sensitif terhadap perubahan iklim di Desa Kayupuring diantaranya adalah petani, peternak, buruh tani, pedagang, buruh pencari pasir, dan tukang batu. Profesi sebagai petani, peternak, dan buruh tani menjadi

jenis profesi yang paling sensitif terdampak perubahan iklim di Desa Kayupuring. Berikut adalah data jenis pekerjaan masyarakat Desa Kayupuring yang sensitif terhadap perubahan iklim.

Tabel 4. Jenis pekerjaan masyarakat Kayupuring yang Sensitif terhadap Perubahan Iklim

No	Jenis Profesi	Jml (jiwa)*	Lokasi	Keterangan
1	Petani	313	Semua dukuh	Hasil panen rendah karena cuaca yang cepat berubah
2	Peternak	222	Semua dukuh	SDM peternak rendah sehingga hasil ternak murah
3	Buruh Tani	156	Semua dukuh	Angka putus sekolah tinggi sehingga bekerja seadanya
4	Pedagang	36	Semua dukuh	Dampak perekonomian yang sulit pedagang terkena dampak
5	Buruh Pencari Pasir	52	Semua dukuh	Pasir smakin susah dicari
6	Tukang Batu	5	Semua dukuh	

*) perkiraan

Sementara sumberdaya manusia Desa Kayupuring yang sensitif terhadap perbahan iklim, berdasarkan kelompok umur dan status kerentaannya adalah kelompok ibu hamil dan menyusui, kelompok Balita, kelompok lansia, kelompok disabilitas dan Anak-anak.

Berdasarkan tingkat kerantanan kelompok masyarakat, menunjukkan bahwa kelompok Anak-anak paling mendominasi di Desa Kayupuring. Kemudian kelompok balita dan lansia. Terakhir adalah kelompok ibu hamil yang rentan terhadap perubahan iklim di Desa Kayupuring. Berikut adalah tabel kelompok yang rentan terhadap perubahan iklim di Desa Kayupuring.

Tabel 5. Kelompok rentan terhadap perubahan iklim Desa Kayupuring

No	Kelompok Umur	Perkiraam Jml (jiwa)	Lokasi (Sebaran)	Keterangan
1	Ibu Hamil	12	Semua Dukuh	Mudah Terserang Penyakit
2	Balita	94	Semua Dukuh	Usia lima tahun kebawah
3	Lansia	94	Semua Dukuh	Usia 60 tahun keatas
4	Anak-anak	238	Semua Dukuh	Usia 5-12 Tahun

2.3. SUMBER DAYA BUATAN (ASET SARANA PRASARANA WILAYAH)

Berdasarkan hasil pemetaan PLUP yang dilakukan di Desa Kayupuring menunjukkan bahwa terdapat beberapa sarana dan prasarana desa yang mendukung aktivitas masyarakat. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya untuk mendukung pelayanan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana kesehatan, dan sarana olahraga. Sarana tersebut tersebar di masing-masing dukuh atau dusun dengan kondisi ada yang baik dan kurang baik. Berikut adalah tabel sumberdaya buatan yang ada di Desa Kayupuring.

Tabel 6. Sumberdaya Buatan Yang terdampak Perubahan Iklim Desa Kayupuring

No	Jenis SDB	Jml	Kondisi	Lokasi	Keterangan
1	Jaringan Jalan				
	Kabupaten	10,5 km	Berfungsi/Kurang Layak	Seluruh Desa	Akses jalan sempit dan butuh perbaikan jalan
	Desa	2 km	Berfungsi/Layak	Seluruh Desa	Akses jalan sempit dan butuh perbaikan jalan
2	Permukiman				
	Rumah		Berfungsi/Layak	Seluruh Desa	Beberapa rumah kurang layak huni
	Tempat Ibadah	20	Berfungsi/Layak	Seluruh Desa	1 Gereja, 1 Masjid
	Sekolah (Madrasah)	3	Berfungsi/Layak		3 SD
	TK/PAUD	6	Berfungsi/Kurang Layak		2 PAUD
	Polindes	7	Berfungsi/Layak		Dirumah Kader
3	Sarana Pertanian				
	Sawah		Kurang Subur	Seluruh Desa	Banyak beralih fungsi ke tanaman sengan
4	Sarana Olah Raga				
	Lapangan Bola	1	Berfungsi/ Layak		Butuh perbaikan
	Lapangan Volley	4	Berfungsi/ Layak		Butuh perbaikan
	Penggilingan Padi	20	Berfungsi/ Layak	Dk. Tembelan	Sebagai sarana usaha, kondisi kurang terawat

2.4. SUMBER DAYA SOSIAL (MODAL SOSIAL)

Berdasarkan pemetaan PLUP atas modal sosial masyarakat diperoleh 11 modal sosial yang ada di Desa Kayupuring menunjukkan bahwa secara umum baik (aktif). Sementara ditemukan tiga jenis modal sosial yang kurang berperan yaitu rutinan yasinan dan tahlil, lelayu, dan peringatan hari besar. Berikut adalah tabel jenis modal sosial yang ada di Desa Kayupuring.

Tabel 7. Modal sosial (SDS) Masyarakat yang mendukung resiliensi masyarakat Desa Kayupuring.

No	Jenis Modal Sosial	Jml	Peran (skor)	Keterangan
1	Kerja Bakti	1	2	Kebersihan Lingkungan dan membangun rumah
2	Yasinan dan Tahlil	1	3	Yasin Tahlil, Sumbangan Jariah warga, ormas NU
3	Lelayu	1	3	Kegiatan sosial Kematian
4	Peringatan hari besar	1	3	Maulid Nabi, Hari Raya dan Natal
5	Karang Taruna	1	1	Kelompok Remaja
6	Kelompok Tani	3	1	Kelompok di bidang pertanian
7	BUMDes	1	1	Badan Usaha milik Desa
8	BPD	1	1	Mitra Pemdes
9	PKK	1	1	Kelompok Pemberdayaan Perempuan
10	LPDH	1	1	Kelompok Masyarakat Sekitar Hutan
11	Lembaga Keamanan Desa	1	1	

Keterangan: skor 1 kurang aktif; skor 2 cukup aktif dan skor 3 aktif; lokasi semua dukuh

2.5. SUMBER DAYA EKONOMI (ASET EKONOMI MASYARAKAT)

Sumberdaya ekonomi yang dimaksud dalam PLUP adalah jenis barang atau komoditas yang diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan terdapat 8 komoditas pertanian dan 2 jenis komoditas peternakan yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Kayupuring. Berikut adalah data jenis komoditas yang diusahakan oleh masyarakat Desa Kayupuring.

Tabel 8. Jenis Komoditas (SDE) Yang diusahakan Masyarakat Desa Kayupuring

No	Jenis Komoditas (Dijual)	Jumlah (Ton) /tahun	Harga Satuan (Rata-rata)	Total harga Rp/ tahun (rata-rata x 1000)	Keterangan
1	Padi	29	4.000/Kg	116.000	96 Petani
2	Gula Aren	4	15.000/Kg	60.000	125 Petani
3	Cabe				
4	Jagung	23	3.000/Kg		96 Petani
5	Kopi	8	20.000/Kg	160.000	200 Petani

No	Jenis Komoditas (Dijual)	Jumlah (Ton) /tahun	Harga Satuan (Rata-rata)	Total harga Rp/ tahun (rata-rata x 1000)	Keterangan
6	Kapulaga	6	85.000/Kg	510.000	
7	Kolang-kaling	16	5.000/Kg	80.000	
8	Kacang panjang	1	5.000/Kg	5.000	
9	Kambing	283 ekor	1.800.000/ekor	509.400	
10	Sapi	302 ekor	13.000.000/ekor	3.926.000	
	TOTAL			5.435.400	

Merujuk dari tabel di atas menunjukkan total pendapatan yang diterima oleh masyarakat Desa Kayupuring adalah sebesar Rp 5.435.400 per tahun atau setiap kepala keluarga mendapatkan pendapatan sebesar Rp 452.950/bulan. Apabila dibandingkan dengan UMK Kabupaten Pekalongan sebesar Rp. 2.094.646¹⁰ atau Rp. 69.821/hari maka pendapatan rata-rata masyarakat Desa Kayupuring sangat dibawah UMK Kabupaten Pekalongan. Disamping pendapatan di atas masyarakat masih mendapatkan sumber pendapatan lain termasuk pendapatan tak terduga.

Sementara berdasarkan dari hasil perhitungan jenis barang yang dikonsumsi rumah tangga menunjukkan bahwa total pengeluaran untuk konsumsi sehari-hari yang mencakup beras, gas, gula, bumbu dan minyak, serta lauk pauk sekitar Rp. 3.456.768/hari. Berikut ini adalah tabel pengeluaran kebutuhan pokok per hari masyarakat Desa Kayupuring.

Tabel 9. Jenis Barang/Komoditas Yang Dibeli (dikonsumsi setiap hari) oleh Masyarakat Kayupuring

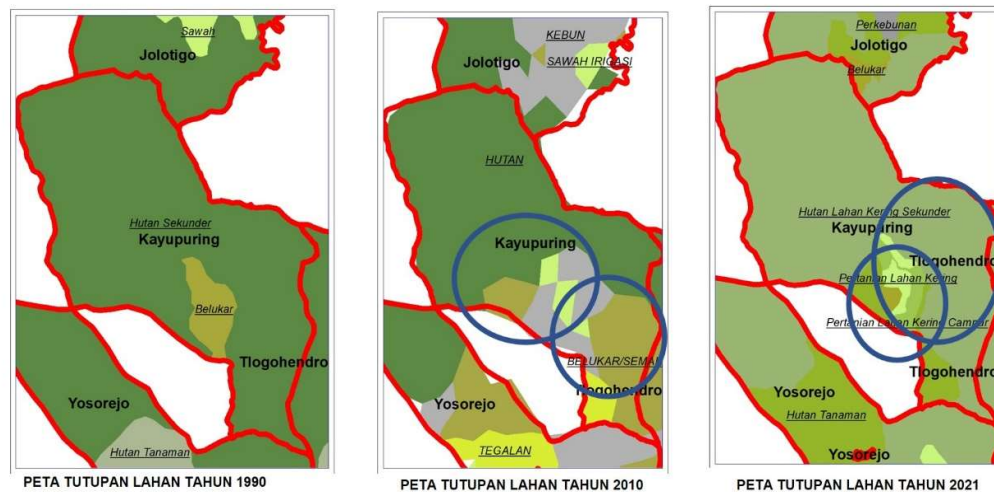
No	Jenis Komoditas (dibeli)	Daya Beli	Rp/Satuan (x1000)	Total Harga Rp/hr (x 1000)	Dibeli Dari
1	Beras	133.444 Kg	10	1.334.440	
2	Gas/Elpiji	2.743 tabung	20	54.840	
3	Gula	5.484 Kg	12	65.808	
4	Bumbu dan Minyak	2000/hari		333.610	
5	Lauk Pauk	10.000/hari		1.668.050	
Total:				3.456.748	

¹⁰ <https://pekalongan.suaramerdeka.com/pekalongan-raya/pr-1812040162/umk-tahun-2022-di-pekalongan-dan-sekitarnya-sudah-ditetapkan>

3. PERUBAHAN TATA GUNA LAHAN DESA

Berdasarkan analisis tutupan lahan wilayah Desa Kayupuring pada tahun 1990, 2000, dan 2021 menunjukkan bahwa perubahan paling banyak terjadi pada tutupan lahan hutan sekunder menjadi perkebunan/tegalan. Kawasan perkubanan tersebut pada tahun 2021 kemudian berubah menjadi semak belukar dan area persawahan.

Desa Kayupuring menjadi salah satu desa yang tutupan kawasan hutanya tidak mengalami perubahan yang signifikan sejak tahun 1990 hingga tahun 2021. Berikut adalah data perubahan lahan Desa Kayupuring pada tahun 1990, 2000, dan 2021.



Peta perubahan tutupan lahan yang terjadi di Desa Kayupuring berdasarkan peta dari KLHK. Perubahan terlihat tahun 2010 yang sebelumnya merupakan daerah Hutan Sekunder sedikit beralih fungsi beralih fungsi menjadi kebun. Kemudian di tahun 2021 tutupan lahan yang dulu kebun mulai menjadi semak belukar dan area persawahan. Untuk hutan sekunder di daerah ini masih terjaga.

Gambar 5: Peta Perubahan Penutupan Lahan 1990, 2000, 2021 Desa Kayupuring

Sementara berdasarkan pemetaan PLUP perubahan lahan pada tahun 1990, 2000, dan 2021 di Desa Kayupuring dapat dilihat dari perubahan-perubahan yang terjadi pada jenis sumberdaya seperti mata air, sungai, hutan, satwa liar, sawah, dan ladang/tegalan. Pada mata air terdapat penurunan debit air terutama pada saat musim kemarau. Perubahan lain terjadi pada lahan sawah dan ladang/tegalan yang saat ini sudah mulai menurun tingkat kesuburannya. Sehingga mempengaruhi hasil pertanian masyarakat. Berikut adalah tabel perubahan sumberdaya alam akibat perubahan iklim di Desa Kayupuring.

Tabel 10. Perubahan Sumberdaya Alam akibat perubahan iklim

No	Jenis SDA	1990	2010	2021
1	Mata Air	Debit Air Melimpah, Bersih dan tidak tercemar, Air keluar dengan stabil sepanjang tahun	Debit Air masih Melimpah, Bersih dan tidak tercemar, Air keluar dengan stabil sepanjang tahun	Debit air sedikit kurang saat musim kemarau, Bersih dan tidak tercemar, hanya kurang perawatan, saat musim hujan debit normal,
2	Sungai	Air jernih Tidak tercemar, debit besar tapi Tidak meluap/ banjir cenderung stabil setiap musim,	Air masih jernih Tidak tercemar, debit besar tapi Tidak meluap/ banjir cenderung stabil setiap musim,	Air Lumayan jernih, agak tercemar, debit Kadang besar kadang kecil sesuai musim bahkan kadang meluap/ banjir dimusim hujan
3	Hutan	Areal luas, Banyak Disekeliling desa, Banyak ditumbuhi kayu besar, sebagai tempat satwa liar, sebagai sumber resapan air hujan	Areal masih luas, Banyak Disekeliling desa, Banyak ditumbuhi kayu besar, sebagai tempat satwa liar, sebagai sumber resapan air hujan	Areal Cukup Luas, Disekeliling desa, Banyak ditumbuhi Kayu, sebagai tempat satwa liar, sebagai sumber resapan air hujan
4	Satwa Liar	Ragamnya banyak, Jumlahnya seimbang,	Ragamnya terdapat peningkatan ragam dan populasi karena tidak ada perburuan satwa banyak, Jumlahnya seimbang,	Ragamnya lumayan banyak, jumlahnya beberapa jenis mengalami peningkatan populasi, dan beberapa lagi sudah jarang dilihat
5	Sawah	Tanah masih subur, tanaman tumbuh dengan baik, irigasi lancar, hama sedikit musim tanam mudah diprediksi	Tanah masih subur, tanaman tumbuh dengan baik, irigasi lancar, hama sedikit musim tanam mudah diprediksi	Tanah keras kurang subur, tanaman tumbuh kurang baik, irigasi lumayan lancar, hama banyak, musim tanam susah diprediksi
6	Ladang/ kebun	Tanah masih subur, tanaman tumbuh dengan baik, hama sedikit musim tanam mudah diprediksi	Tanah masih subur, tanaman tumbuh dengan baik, hama sedikit musim tanam mudah diprediksi	Tanah keras kurang subur, beberapa sudah mulai erosi, tanaman tumbuh kurang baik, hama banyak, musim tanam susah diprediksi, Alihfungsi lahan

Berdasarkan tabel diatas dalam kurun waktu 30 tahun terakhir dapat dikatakan bahwa kondisi sumberdaya alam tidak terlalu mengalami degradasi yang cukup berarti. Sehingga kondisi sumberdaya alam Desa Kayupuring masih relatif terjaga kelestariannya.

4. PERMASALAHAN DESA KAYUPURING

4.1. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan pemetaan masalah dalam proses workshop PLUP diperoleh daftar masalah sebagai berikut.

- Pencemaran air sungai,
- Perburuan liar pada satwa disekitar hutan,
- Meningkatnya populasi Babi membuatnya jadi hama diladang warga,
- Alihfungsi Sawah menjadi Kebun Sengon
- Penggunaan pupuk dan Pestisida yang berlebihan,
- Pemanfaatan SDA yang tidak bertanggungjawab,
- Tanah Longsor dibeberapa lahan pertanian warga bagian pegunungan saat Musim Penghujan
- Kekeringan diladang masyarakat Pada Musim kemarau,
- Penebangan Liar dihutan Bambu,
- Jalan dan akses pertanian yang rusak
- Pengetahuan terhadap pertanian yang berkelanjutan kurang,
- Pengetahuan terhadap peternakan , terutama pemilihan bakalan sapi yang masih minim pengetahuan
- Kurang ketrampilan dalam pemanfaatan SDA yang benar,
- Akses jalan Desa Sempit
- Koordinasi antar dukuh jauh,
- Belum adanya bak penampungan air bersih komunal (pengaturan Penggunaan Air Bersih)
- Drainase kampung kurang terawat, rusak dan banyak sampah saat banjir,
- Internet/ Jaringan Susah (ketersediaan informasi dari luar terbatas dan lambat) beberapa perangkat
- Pipa saluran air bersih kerumah warga belum tertata baik/ belum rapi,

- Akses ke puskesmas jauh,
- Produktifitas rendah,
- Harga Jual Komoditas Rendah,
- Biaya Transportasi hasil panen tinggi,
- Akses Pasar Jauh,
- Alat Produksi Masih Tradisional,
- Hama Susah dikendalikan,
- Musim Susah diprediksi membuat banyak komoditas pertanian produktifitas rendah bahkan sampai gagal panen,
- Musim Kemarau Susah Air untuk Produksi Pertanian,
- Kurangnya permodalan untuk melakukan usaha tani,
- Kurangnya pendampingan tehnik pertanian dan peternakan dalam kelompok tani
- Kurangnya Sosialisasi mengenai program-program dari dinas seperti kartu tani
- Harga pupuk mahal
- Belum ada Tempat Pembuangan Sampah Akhir
- Perawatan Sarana Usaha tani Belum dilakukan dengan baik
- Belum ada Pengetahuan tentang keselamatan kerja, khususnya bagi para pencari pasir
- SDM mengenai pertanian dan peternakan rendah
- Pemilihan bibit yang salah sehingga berakibat pada hama dan hasil panen
- Modal rendah
- Akses Pemasaran hasil pertanian dan peternakan yang belum ada
- SDM mengenai pertanian dan peternakan rendah
- Pemilihan bibit yang salah sehingga berakibat pada hama dan hasil panen
- Kesadaran masyarakat peduli lingkungan masih rendah
- Tingkat pendidikan yang rendah
- Tidak ada pendampingan dari instansi terkait
- Masyarakat masih enggan beralih kepada metode peternakan dan pertanian modern

4.2. ISU STRATEGIS DESA KAYUPURING

Berdasarkan proses pengelompokan masalah, diperoleh isu-isu strategis di Desa Kayupuring sebagai berikut.

1. Kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada petani sektor pertanian dan peternakan

Rumusan isu strategis ini diperoleh dari pengelompokan masalah sebagai berikut:

- Harga pupuk mahal
- Alihfungsi Sawah menjadi Kebun Sengon
- Jalan dan akses pertanian yang rusak
- Biaya Transportasi hasil panen tinggi,
- Akses Pasar Jauh,
- Alat Produksi Masih Tradisional,
- Kurangnya pendampingan tehnik pertanian dan peternakan dalam kelompok tani
- Kurangnya Sosialisasi mengenai program-program dari dinas seperti kartu tani
- Harga pupuk mahal
- Tidak ada pendampingan dari instansi terkait

2. Menurunnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian hutan dan satwa liar

Rumusan isu strategis ini diperoleh dari pengelompokan masalah sebagai berikut:

- Perburuan liar pada satwa disekitar hutan
- Pemanfaatan SDA yang tidak bertanggungjawab,
- Penebangan Liar di hutan Bambu
- Belum ada Tempat Pembuangan Sampah Akhir
- Kesadara masyarakat peduli lingkungan masih rendah

3. Terganggunya kelestarian lingkungan akibat pencemaran, serta kurangnya perlakuan konservasi di lahan kemiringan tinggi dan sepadan mata air

Rumusan isu strategis ini diperoleh dari pengelompokan masalah sebagai berikut:

- Pencemaran air sungai
- Tanah Longsor di beberapa lahan pertanian warga bagian pegunungan saat Musim Penghujan
- Kekeringan diladang masyarakat Pada Musim kemarau,
- Musim Kemarau Susah Air untuk Produksi Pertanian,

4. Terbatasnya sarana dan prasarana desa serta jaringan akses informasi masyarakat

Rumusan isu strategis ini diperoleh dari pengelompokan masalah sebagai berikut:

- Akses jalan Desa Rusak,
- Akses jalan Desa Sempit
- Belum adanya bak penampungan air bersih komunal (pengaturan Penggunaan Air Bersih)
- Drainase kampung kurang terawat, rusak dan banyak sampah saat banjir,
- Internet/ Jaringan Susah (ketersediaan informasi dari luar terbatas dan lambat) beberapa perangkat
- Pipa saluran air bersih kerumah warga belum tertata baik/ belum rapi,

5. Rendahnya kapasitas masyarakat dalam bidang pertanian dan peternakan yang menyebabkan pendapatan petani rendah

Rumusan isu strategis ini diperoleh dari pengelompokan masalah sebagai berikut:

- Penggunaan pupuk dan Pestisida yang berlebihan
- Pengetahuan terhadap pertanian yang berkelanjutan kurang,
- Pengetahuan terhadap peternakan , terutama pemilihan bakalan sapi yang masih minim pengetahuan
- Meningkatnya populasi Babi membuatnya jadi hama diladang warga
- Kurang ketrampilan dalam pemanfaatan SDA yang benar,
- Harga Jual Komoditas Rendah,
- Hama Susah dikendalikan,
- Musim Susah diprediksi membuat banyak komoditas pertanian produktifitas rendah bahkan sampai gagal panen,
- SDM mengenai pertanian dan peternakan rendah
- Pemilihan bibit yang salah sehingga berakibat pada hama dan hasil panen
- Tingkat pendidikan yang rendah
- Masyarakat masih enggan beralih kepada metode peternakan dan pertanian modern

6. Kelembagaan desa dan kelompok tani masih lemah

Rumusan isu strategis ini diperoleh dari pengelompokan masalah sebagai berikut:

- Koordinasi antar dukuh jauh dan susah,
- Harga Jual Komoditas Rendah,
- Kurangnya permodalan untuk melakukan usaha tani,

- Perawatan Sarana Usaha tani Belum dilakukan dengan baik
- Belum ada Pengetahuan tentang keselamatan kerja, khususnya bagi para pencari pasir

Dari hasil pengelompokan masalah diatas, di peroleh 6 isu strategis sebagai, yaitu:

- Kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada petani sektor pertanian dan peternakan
- Menurunnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian hutan, dan satwa liar
- Terganggunya kelestarian lingkungan akibat pencemaran, serta kurangnya perlakuan konservasi di lahan kemiringan tinggi dan sepadan mata air
- Terbatasnya sarana dan prasarana desa serta jaringan akses informasi masyarakat
- Rendahnya kapasitas masyarakat dalam bidang pertanian dan peternakan
- Kelembagaan desa dan kelompok tani yang masih lemah

Keenam isu startegis inilah yang dinilai masyarakat menyebabkan rendahnya kesejahteraan masyarakat di Desa Kayupuring.

4.3. PENENTUAN PRIORITAS MASALAH

Untuk mendapatkan prioritas penanganan akar masalah (yang menjadi isu strategis) di Desa Kayupuring, dilakukan analiisis prioritas, melauai skoring tingkat pengaruh/dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari masing-masing akar masalah. Skor dibuat dengan menggunakan skala likert, 5,4,3,2 dan 1, dimana masing skor bermakna:

- Skor 5, untuk menunjukkan dampak sangat besar, dan mempengaruhi banyak orang
- Skor 4, untuk menunjukkan dampak cukup besar, dan mempengaruhi banayk orang/banyak kelompok
- Skor 3, untuk menunjukkan dampak sekitar 50% dari masyarakat/kelompok masyarakat.
- Skor 2, menunjukkan dampak kecil/sedikit kelompok/orang
- Skor 1, menunjukkan dampak sangat kecil/ 1 kelompok masyarakat

Berdasarkan hasil pleno penilaian (skoring) menunjukkan hasil sebagaimana tabel berikut:

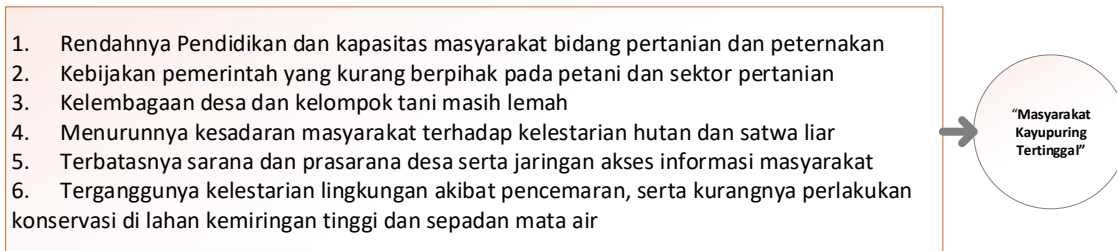
Tabel 11. Hasil Penilaian (Skoring) Prioritas Akar Masalah Desa Kayupuring

Jenis Isu Strategis	Skor	Rangking
Kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada petani dan sektor pertanian	14	Prioritas ke-2
Menurunnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian hutan dan satwa liar	12,5	Prioritas ke-4
Terganggunya kelestarian lingkungan akibat pencemaran, serta kurangnya perlakuan konservasi di lahan kemiringan tinggi dan sepadan mata air	10	Prioritas ke-6
Terbatasnya sarana dan prasarana desa serta jaringan akses informasi masyarakat	11	Prioritas ke-5
Rendahnya pendidikan dan kapasitas masyarakat bidang pertanian dan peternakan	15	Prioritas ke-1
Kelembagaan desa dan kelompok tani masih lemah	13	Prioritas ke-3

Dari hasil skoring sebagaimana tabel diatas, diperoleh susunan akar masalah sebagai berikut:

1. Rendahnya Pendidikan dan kapasitas masyarakat dalam bidang pertanian dan peternakan
2. Kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada petani dan sektor pertanian
3. Kelembagaan desa dan kelompok tani masih lemah
4. Menurunnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian hutan dan satwa liar
5. Terbatasnya sarana dan prasarana desa serta jaringan akses informasi masyarakat
6. Terganggunya kelestarian lingkungan akibat pencemaran, serta kurangnya perlakuan konservasi di lahan kemiringan tinggi dan sepadan mata air

Keenam akar masalah ini yang dinilai masyarakat menyebabkan **"Masyarakat Kayupuring Tertinggal"**. Sehingga dalam penanganannya membutuhkan arahan program yang sistematis dan terintegrasi. Keenam isu strategis digambarkan dalam diagram berikut:



Gambar 6: Diagram isu strategis Desa Kayupuring

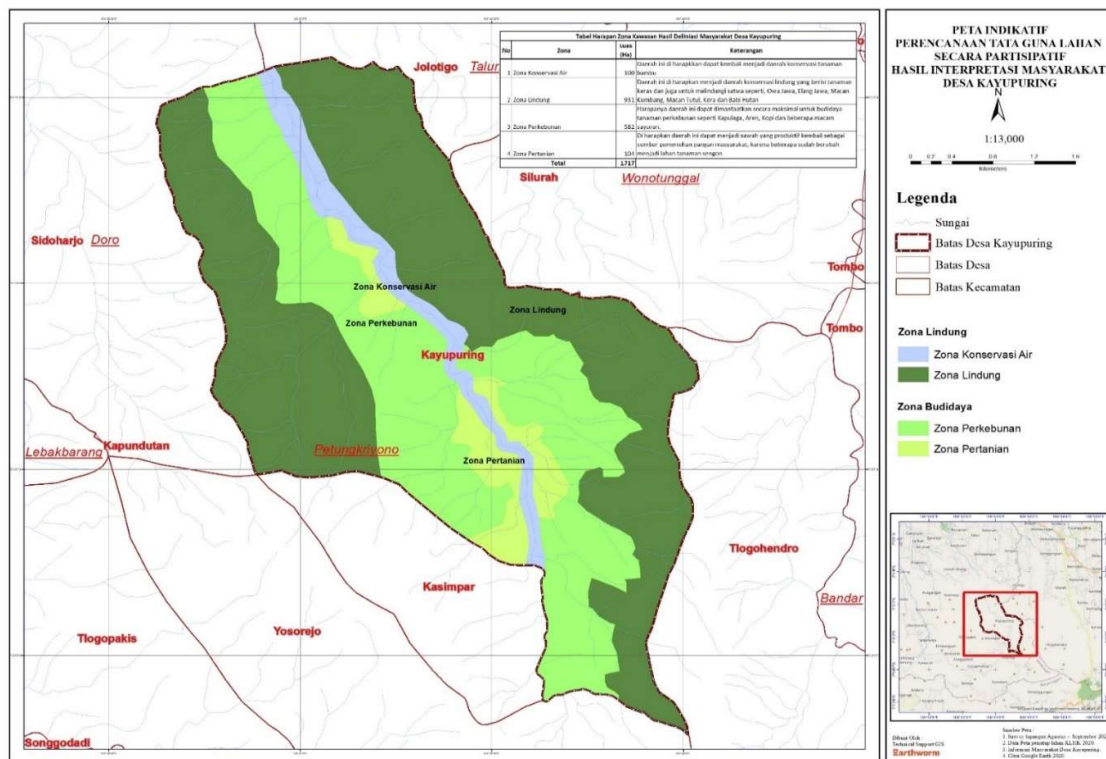
BAB IV ZONASI & ARAHAN PENGELOLAAN

1. ZONASI PENGELOLAAN WILAYAH KAYUPURING

Dalam hal penentuan zonasi Desa Kayupuring adalah memperhatikan fungsi-fungsi kawasan yang akan dijadikan sebagai fungsi lindung atau budidaya. Dari hasil pemetaan PLUP terdapat sumberdaya alam yang secara fungsi ditujukan sebagai kawasan lindung dan budidaya yaitu sebagai berikut:

- Fungsi lindung/pemanfaatan terbatas yang mencakup hutan, sungai, dan mata air
- Fungsi budidaya mencakup sawah, perkebunan dan permukiman.

Berikut ini adalah zonasi pengelolaan Desa Kayupuring:



Gambar 7: Peta Zonaasi Arahan Pengelolaan Tata Guna Lahan Desa Kayupuring

Dari penentuan zonasi masyarakat ini, kemudian dijadikan arahan masyarakat dalam mengelola masing-masing jenis sumber daya alam yaitu sebagai berikut.

- Tegalan/Ladang, diarahkan untuk zona budidaya tanaman pangan serta kehutanan.
- Hutan Lindung, diarahkan untuk zona kawasan lindung, yaitu area sumber resapan air dan pelestarian ekosistem habitat satwa. Terdiri atas pepohonan besar dan semak-semak tumbuhan bawah

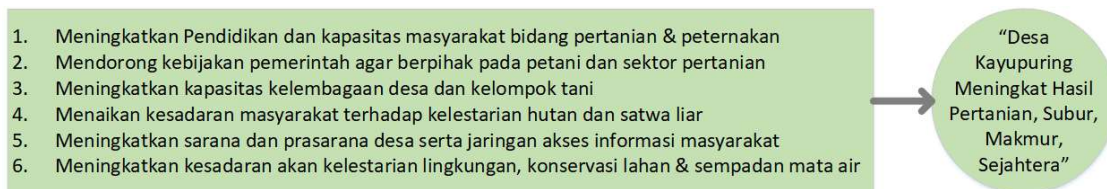
- Hutan Produksi, diarahkan untuk zona lindung dan zona budidaya tanaman pangan dibawah tegakan.
- Sawah, adalah zona kawasan budidaya untuk tanaman pangan, serta hortikultura.
- Pemukiman, adalah kawasan pemukiman warga berupa rumah tinggal serta bangunan sarana dan prasarana lainnya.
- Perkebunan, diarahkan sebagai zona kawasan budidaya tanaman keras yang didalamnya terdapat berabagai jenis tanaman seperti kopi, kapulaga, aren, dan bambu.

2. ARAHAN STRATEGIS PENGEMBANGAN WILAYAH

Merujuk pada peta visi masyarakat Desa Kayupuring, dan 6 isu strategis, maka strategis pengembangan wilayah Kayupuring adalah:

1. Meningkatkan Pendidikan dan kapasitas masyarakat bidang pertanian dan peternakan
2. Mendorong kebijakan pemerintah agar berpihak pada petani dan sektor pertanian
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dan kelompok tani
4. Menaikan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian hutan dan satwa liar
5. Meningkatkan sarana dan prasarana desa serta jaringan akses informasi masyarakat
6. Meningkatkan kesadaran akan kelestarian lingkungan, konservasi lahan dan sempadan mata air

Dari keenam arahan strategis di atas dinilai oleh masyarakat dapat mewujudkan masyarakat “Desa Kayupuring Meningkatkan Hasil Pertanian, Subur, Makmur, Sejahtera”. Berikut ini adalah diagram arahan strategis pengembangan wilayah Desa Kayupuring:



Gambar 8: Diagram Arahan Strategis Pengembangan Wilayah Kayupuring

3. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH

3.1. PROGRAM PENINGKATKAN KAPASITAS MASYARAKAT BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Tabel 12: program/kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat bidang pertanian dan peternakan

No	Program	Indikator	Target	Para Pihak
1	Identifikasi kebutuhan training pertanian dan peternakan	Adanya list kebutuhan training bidang pertanian dan peternakan	Semua kebutuhan training bidang pertanian dan peternakan telah di list dengan baik	Pemerintah desa, kelompok tani
2	Rencana penyelenggaraan training bidang pertanian dan peternakan	Terdapat dokumen rencana kebutuhan training bidang pertanian dan peternakan	Semua kebutuhan training telah dimasukan ke dalam dokumen rencana	Pemerintah desa, kelompok tani
3	Mencari instansi yang bisa diajak untuk menyelenggarakan training	menemukan instansi yang bisa memberikan training sesuai kebutuhan	Semua kebutuhan training bisa dibantu oleh instansi yang terkait	Dinas pertanian, Dinas peternakan
4	Penyelenggaraan training berdasarkan kebutuhan	Terselenggaranya training sesuai dengan kebutuhan	semua petani dan peternak mendapat training sesuai dengan kebutuhan	Dinas pertanian, dinas peternakan, pemerintah desa, kelompok tani
5	Demplot usaha budidaya pertanian dan peternakan sesuai dengan training	terbentuknya demplot usaha budidaya pertanian dan peternakan sesuai dengan training	Demplot bisa berjalan sesuai dengan teori yang disampaikan dalam training	dinas pertanian, dinas peternakan, pemerintah desa, kelompok tani

3.2. PROGRAM MENDORONG KEBIJAKAN PEMERINTAH AGAR BERPIHAK PADA PETANI DAN SEKTOR PERTANIAN

Tabel 13: Program Mendorong Kebijakan pemerintah Agar berpihak pada petani dan sektor pertanian

No	Program	Indikator	Target	Para Pihak
1	Advokasi kebijakan dalam bidang pertanian secara luas	terbentuknya tim advokasi yang mampu melakukan loby terhadap instansi terkait	Munculnya kebijakan menyangkut dunia pertanian oleh instansi terkait	Dinas Pertanian

3.3. PROGRAM MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DESA DAN KELOMPOK TANI

Tabel 14: Program Meningkatkan kapasitas Kelembagaan desa dan kelompok tani

No	Program	Indikator	Target	Para Pihak
1	Penguatan legalitas kelembagaan kelompok tani	Kelembagaan kelompok tani mempunyai legalitas yang nyata	Semua kelompok tani mendapatkan legalitas	Pemerintah desa, kelompok tani, dinas pertanian
2	Training kelembagaan kelompok tani dalam membangun kemandirian kelompok	Kelompok tani mandiri dan lebih kuat dalam meningkatkan kapasitas petani secara teknis maupun ekonomi	Semua kelompok tani menjadi lebih mandiri dalam peningkatan ekonomi maupun teknis	pemerintah desa, PMD, dinas pertanian, Dinas peternakan

3.4. PROGRAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KELESTARIAN HUTAN DAN SATWA LIAR

Tabel 15: Program Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian hutan dan satwa liar

No	Program	Indikator	Target	Para Pihak
1	Kampanye peyadaran terhadap kelestarian hutan dan satwa liar	terdapat model-model kampanye penyadaran terhadap kelestarian lingkungan dan satwa liar	Masyarakat sadar bahwa kelestarian hutan dan satrwa liar adalah penting	Perhutani, CDK, pemerintah desa
2	Pembuatan peraturan desa (perdes) pelestarian utan dan satwa liar	terdapat dokumen perdes tentang kelestarian hutan dan satwa liar	Perdes disahkan sebagai bagain keputusan desa dan disosialisakan kepada masyarakat	Perhutani, pemerintah desa

3.5. PROGRAM MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA DESA SERTA JARINGAN AKSES INFORMASI MASYARAKAT

Tabel 16: Program meningkatkan sarana dan prasarana desa serta jaringan akses informasi masyarakat

No	Program	Indikator	Target	Para Pihak
1	Advokasi tentang program pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana desa	terdapat program yang pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana desa	terpeliharannya sarana dan prasarana desa, serta danya pembangunan sesuai dengan kebuuhan	Disperkim, Bapepda
2	Advokasi tentang dibangunnya sarana tower komunikasi	terbangunnya tower komunikasi yang bisa menjangkau wilayah desa	semua desa bisa dijangkau oleh sinyal telepon maupun internet	pemerintah daerah, telkomsel

3.6. PROGRAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN, KONSERVASI LAHAN DAN MATA AIR

Tabel 17: Program meningkatkan kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan, konservasi lahan dan mata air

No	Program	Indikator	Target	Para Pihak
1	Kampanye peyadaran terhadap bahaya pencemaran lingkungan dan pentingnya konservasi lahan terutama di areal kemiringan	terdapat model-model Kampanye peyadaran terhadap bahaya pencemaran lingkungan dan pentingnya konservasi lahan terutama di areal kemiringan	Masyarakat sadar bahwa tentang bahaya pencemaran lingkungan dan pentingnya konservasi lahan terutama di areal kemiringan	Perhutani, CDK, pemerintah desa, DLH
2	Pembuatan peraturan desa (perdes) pencemaran lingkungan dan pentingnya konservasi lahan terutama di areal kemiringan	terdapat dokumen perdes pencemaran lingkungan dan pentingnya konservasi lahan terutama di areal kemiringan	Perdes disahkan sebagai bagain keputusan desa dan disosialisakan kepada masyarakat	Perhutani, pemerintah desa, DLH

4. PROGRAM PRIORITAS (JANGKA DEKAT)

Berdasarkan diskusi PLUP yang dilaksanakan di Desa Kayupuring, diperoleh data program yang penting dilaksanakan di tahun 2022 guna meningkatkan ekonomi masyarakat. Berikut data program yang dapat dilaksanakan di tahun 2022.

Tabel 18. Program yang perlu dilaksanakan di tahun 2022

No	Program	Indikator	Target	Para Pihak
1	Pelatihan Pengolahan lahan	adanya model pengolahan lahan yang benar	semua petani memahami cara mengola tanah secara benar	Dinas Pertanian, Perum Perhutani
2	Pelatihan Penanganan hama	Dikenalnya cara penanganan HPT secara baik	semua petani memahami tata cara penanganan HPT secara lebih baik	Dinas Pertanian, Perum Perhutani
3	Pelatihan pemeliharaan tanaman kopi dan kapulaga	Adanya teknologi yang lebih baik tentang budidaya kopi dan kapulaga	Produktivitas budidaya budidaya kopi dan kapulaga menjadi lebih baik	Dinas Perkebunan, Perhutani
4	Pembibitan dan Penggemukan sapi	Adanya teknologi pembuatan bibit anakan sapi dengan kualitas tinggi	mampu mandiri dalam menghasilkan bibit sapi dengan kualitas tinggi	dinas peternakan,

5	Pelatihan Pembuatan pakan ternak	adanya jenis pakan ternak diluar HMT yang mampu diproduksi sendiri	Tersedianya pakan yang berkualitas sehingga produktivitas ternak meningkat	dinas peternakan
6	Pelatihan pembuatan pupuk organik/kompos	Dimanfaatkannya kotoran sapi sebagai pupuk kompos	Terdapat pupuk kompos yang murah dan mudah didapat sehingga meningkatkan kualitas tanah dan tanaman	dinas peternakan, dinas pertanian
7	Pemasaran hasil produk	Adanya alternatif pasar yang lebih luas tidak hanya terikat dengan tengkulak saja	Meningkatnya harga serta serapan produksi pertanian	disperindag koperasi dan UKM,

LAMPIRAN

Daftar Hadir PLUP Masyarakat Kayupuring

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
 Tanggal : 25 NOV. 2021
 Tempat : Rumah Ibu KURNI
 Acara : FGD 1 ~~2021~~ Kayupuring

No	Nama	Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1	Surenah	48	Kayupuring	1.
2	Bawon		Kayupuring	2.
3	Dariyah		Kayupuring	3.
4	Sri Murni		Kayupuring	4.
5	Ruliyah		Kayupuring	5.
6	US		Kayupuring	6.
7	Sri Murni		Kayupuring	7.
8	Edonifah		Kayupuring	8.
9	Siti Rohyati		- - -	9.
10	Kastamah		Kayupuring	10.
11	Sarni		Kayupuring	11.
12	Harmono		Kayupuring	12.
13	Nur Pujasth		Kayupuring	13.
14	Turah Aisyah		- - -	14.
15	Wihartini		- - -	15.
16	Carmini		- - -	16.
17	Wartiah		- - -	17.
18	Rasiti		- - -	18.
19	Sumarni		- - -	19.
20	Rahayu		- - -	20.
21	Turipah		- - -	21.
22	Sutri Asih		- - -	22.
23	Turipah		- - -	23.
24	Kastiyah		- - -	24.

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
Tanggal : 26 Nov 2021
Tempat : Rumah Pp SOEIRIN
Acara : FGD KATUPURING

No	Nama	Unsur	Alamat	Tanda Tangan
15	SoFiyah		Katupuring x. Hic	
16	Siti usipah		- " -	26. Hic
17	wahyuni		- " - 27. Hic	
18	Mulyoti		- " -	28. Hic
19	Surati		- " - 29. Hic	
20	Muriah		- " -	30. Hic
21	Siti Mocasni		- " - 31. Hic	
22	Damari		- " -	32. Hic
23	DAMIAH		- " - 33. Hic	
24	Kundeng		- " -	34. Hic
25	humardh		12. Hic	
26	Sri Sumbarsih		"	35. Hic
27	Desiyah		"	Hic
28	Murjanah		"	Hic
29	Siti Raabi		- " -	Hic
30	SURIAH		- " -	Hic
31	CORRYON		- " -	Hic
32	Musnaeni		- " -	Hic
33	Pohati		- " -	Hic
34	kudung		- " -	Hic
35	Teguh		- " -	Hic
36	Kasmi		- " -	Hic
37	SUNARTI		- " -	Hic
38	Sumiah		- " -	Hic

Lampiran Foto PLUP

